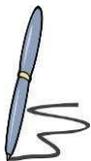
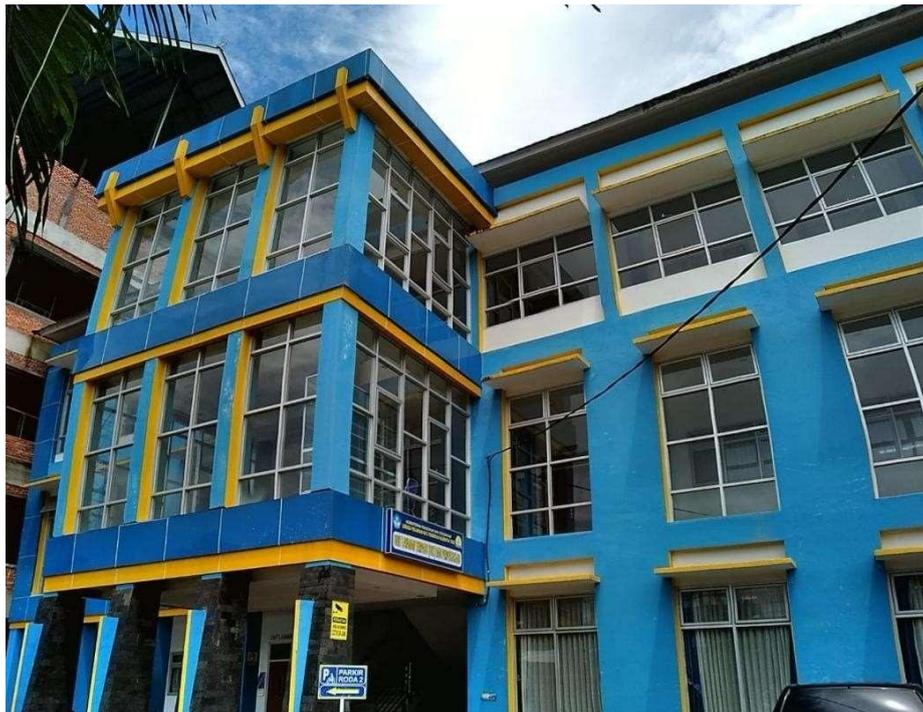




RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2020–2024



Tujuan, Indikator kinerja tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja sasaran Arah



Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Target



Kinerja dan Kerangka Pendanaan

KATA PENGANTAR

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dikdas dan Dikmen, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dikdas dan Dikmen tahun 2020–2024.

Rencana Strategis sebagai dokumen utama yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, dan program. Didalam tujuan dan sasaran memuat indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran, yang mendukung terlaksananya Penjaminan Mutu Pendidikan baik Pendidikan dasar maupun menengah. Dokumen Rencana Strategis inilah yang menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Rencana strategis ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kinerja atau program kerja tahunan dan menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahun.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan kebijakan dari Kementerian, rencana strategis senantiasa perlu direviu secara periodik, untuk disempurnakan dan dilakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Perubahan-perubahan ini terkait dengan kebijakan internal dan capaian target tahunan dalam bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam mereviu rencana strategis ini diperlukan keterlibatan semua ekosistem pendidikan baik internal maupun eksternal untuk perbaikan dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 27 Januari 2020

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur



Mohamad Hartono, S.H.,M.Ed.
NIP. 196701101994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Kondisi Umum.....	1
A. Capaian Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	3
B. Isu Strategis yang Berkembang	19
Potensi dan Permasalahan	21
A. Potensi yang Dimiliki	21
B. Permasalahan yang Dihadapi.....	22
C. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	24
BAB II TUJUAN DAN SASARAN LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	26
A. TUJUAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN STRATEGIS	26
B. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN.....	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	30
Arah Kebijakan dan Strategi	30
Kerangka Regulasi	32
Kerangka Kelembagaan	33
Reformasi Birokrasi	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	38
Target Kinerja	38
Kerangka Pendanaan.....	40
BAB V PENUTUP	44
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Pada hakikatnya pembangunan pendidikan merupakan upaya yang sistematis dan terencana untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pembangunan pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor-sektor lain. sehingga, penyusunan rencana pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh unsur pembangunan yang terkait seperti kondisi sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, penyusunan rencana strategis pendidikan dasar dan menengah tahun 2020-2024 memperhatikan hal-hal yang telah dicapai pada periode perencanaan sebelumnya (tahun 2015-2019) melalui evaluasi pelaksanaan yang seksama, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan memperhatikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020–2024 berawal dari pembahasan Rencana Strategis untuk menghasilkan Rencana Strategis aplikatif bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Pembahasan Rencana Strategis mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, termasuk target kinerja dan kerangka pendanaan. Pembahasan Rencana Strategis tersebut relevan dengan peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dijelaskan bahwa arah pembangunan untuk RPJMN ke-4 2020–2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan program prioritas meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tema pembangunan Pendidikan menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005–2025 diselaraskan dengan tema

pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Berikut disajikan Tabel Tema Pembangunan Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 1.1 Tema Pembangunan



Sejalan dengan amanat Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam **Nawacita**, berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional (3) Melakukan revolusi karakter bangsa (4) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pengaturan operasional untuk mewujudkan nawa cita dan hak memperoleh pendidikan di jabarkan dalam Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 dan peraturan turunan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, selanjutnya kebijakan ini dijabarkan dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Implementasinya yang akan diprogramkan oleh Kementerian dan Lembaga adalah terwujudnya (1) Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial; (2) Produktivitas; dan (3) Pembangunan Karakter. Ketiga hal ini terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan layanan dasar menyangkut pendidikan, urusan produktivitas menyangkut pendidikan dan pelatihan vokasi dan pembangunan karakter menyangkut pendidikan keagamaan, pendidikan kewarganegaraan. Arah strategi nasional pembangunan pendidikan adalah **Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.**

Oleh karena itu, sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.35 tahun 2014 pasal 4 ayat 5 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 bahwa unit kerja eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis menyusun dan menetapkan Rencana Strategis untuk 5 tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis eselon I. Berdasarkan Peraturan Menteri di atas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Rencana strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020–2024 dan hasil evaluasi Rencana Strategis tahun 2015-2019. Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di masing-masing provinsi, sehingga acuan dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, indikator kinerja, program dan indikator kinerja kegiatan (IKK) serta output Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan harus mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah 2020–2024.

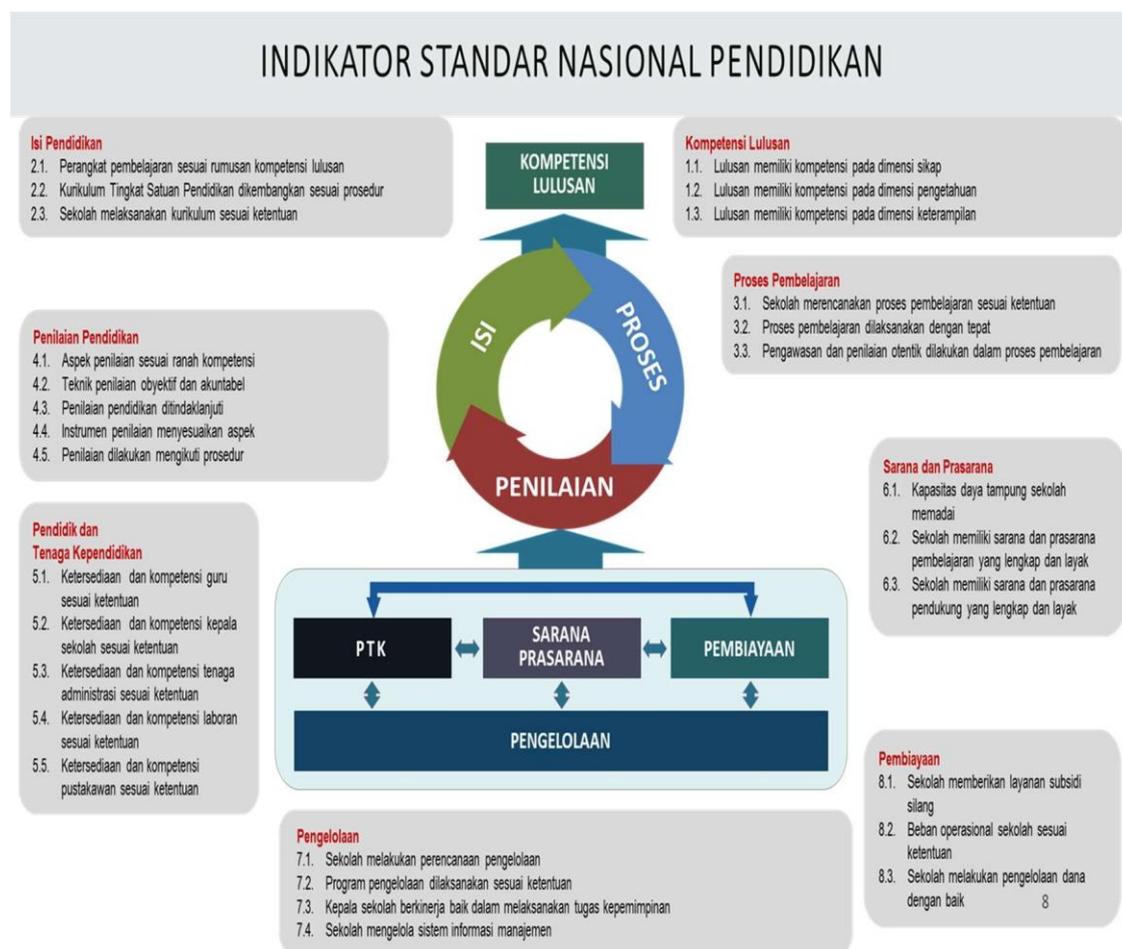
A. Capaian Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Dalam periode Renstra Tahun 2015-2019, LPMP Kalimantan Timur telah melakukan pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan 8 SNP, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pencapaian 8 SNP serta peningkatan tatakelola di lingkungan LPMP Kalimantan Timur. Hasil pemetaan mutu, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan sebagai capaian kinerja LPMP Kalimantan Timur selama periode Renstra 2015-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. PEMETAAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN

Pemetaan mutu satuan pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK) di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sejak tahun 2016–2019 melalui Aplikasi Pemetaan Mutu

Pendidikan (PMP) yang dikembangkan oleh Satgas PMP Ditjen Dikdasmen. Instrumen PMP berisi penilaian terhadap indikator 8 standar nasional pendidikan.



Gambar 1.1 Indikator Standar Nasional Pendidikan

Pengisian instrumen PMP dilakukan oleh sekolah (responden: kepala sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah), divalidasi oleh pengawas sekolah dan dikawal oleh LPMP. Aplikasi PMP terintegrasi dengan Dapodik dan menghasilkan Rapor Mutu Sekolah yang berisi capaian mutu Satuan pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berikut ini capaian mutu satuan pendidikan sejak tahun 2016-2019.

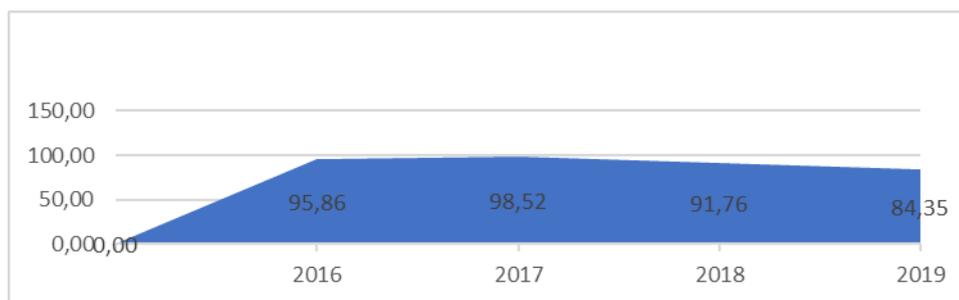
Tabel 1.2 Progres Sekolah yang Telah Melakukan Pengisian Data Mutu (Data PMP Online 16 Oktober 2020)

Sekolah	2016	2017	2018	2019
SD	1831	1867	1750	1625

Sekolah	2016	2017	2018	2019
SMP	599	626	580	559
SMA	210	215	191	169
SMK	209	220	206	154
Sekolah	2849	2928	2727	2507

Jumlah sekolah yang terpetakan mutunya rata rata telah mencapai 92,62% sekolah melakukan pengisian data mutu dalam rentang 2016–2019.

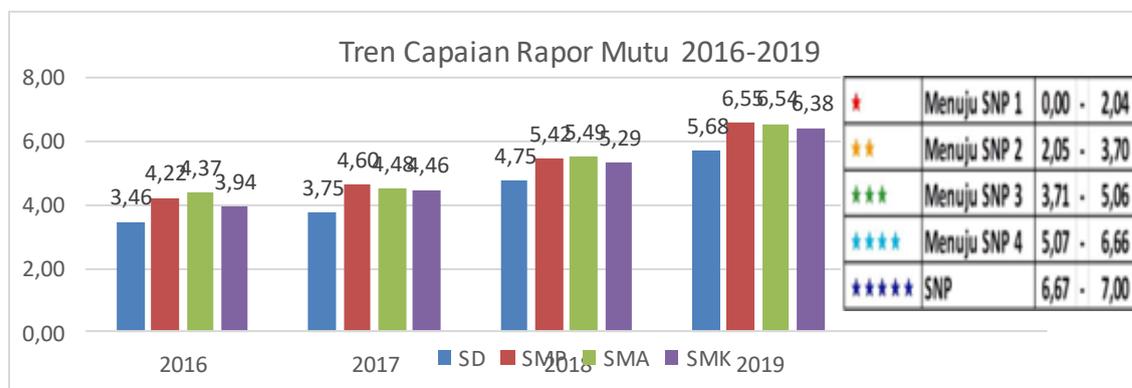
**Gambar
Persentase
yang**



**1.2
Sekolah**

Terpetakan Mutu

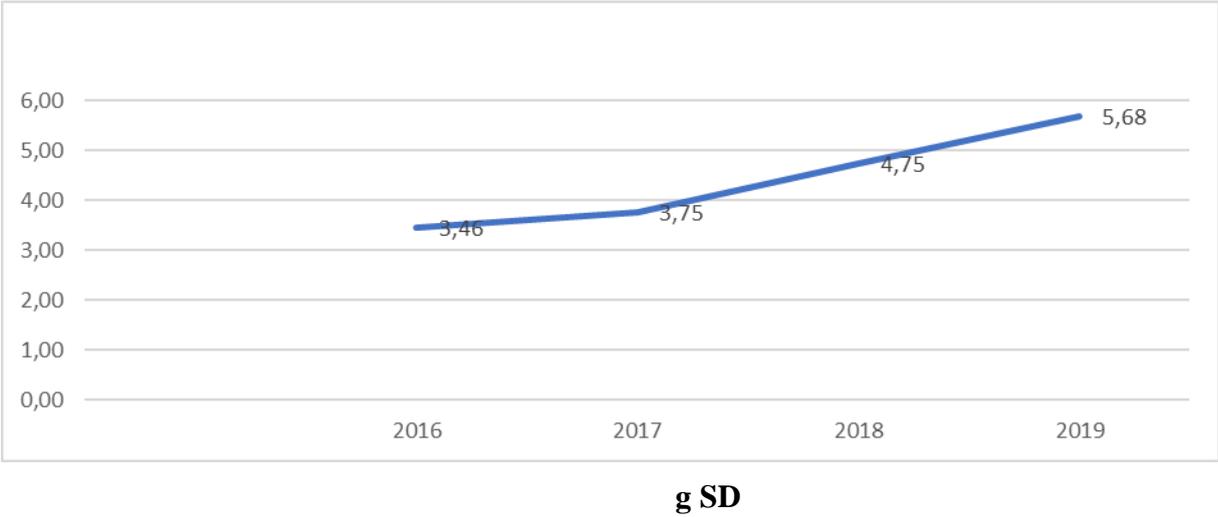
Dari sekolah-sekolah yang telah terpetakan mutunya dapat dilihat tren capaian rapor mutu 2016–2019.



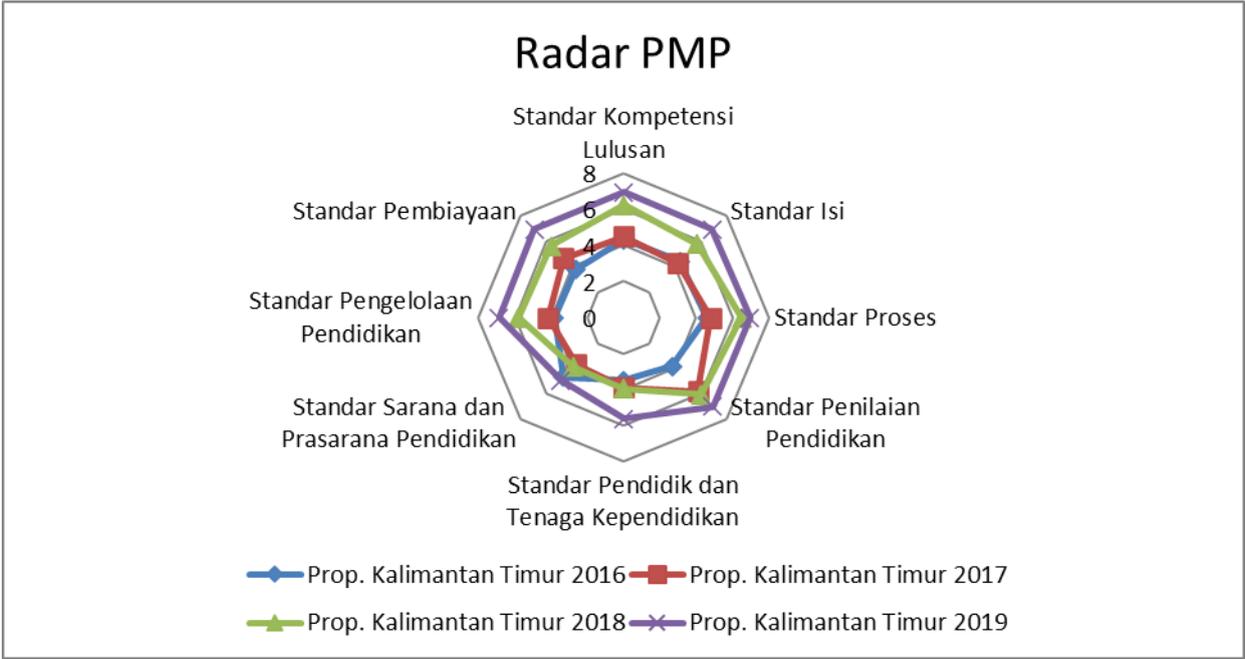
Gambar 1.3 Tren Capaian Rapor Mutu

Tren Capaian SNP jenjang SD, SMP, SMA dan SMK menunjukkan adanya peningkatan capaian SNP dari tahun 2016 hingga 2019.

A. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD

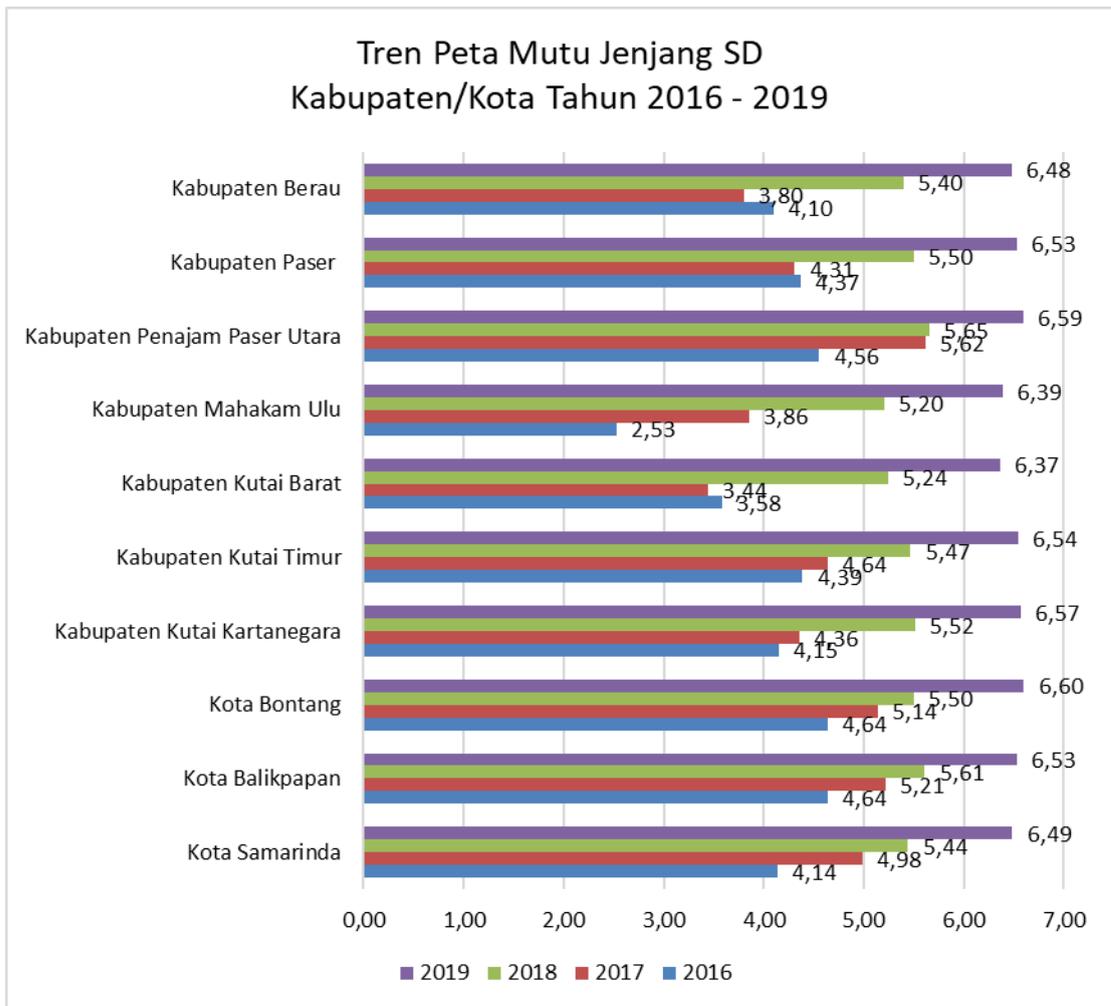


Perbandingan capaian SNP jenjang SD menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d. 2019.

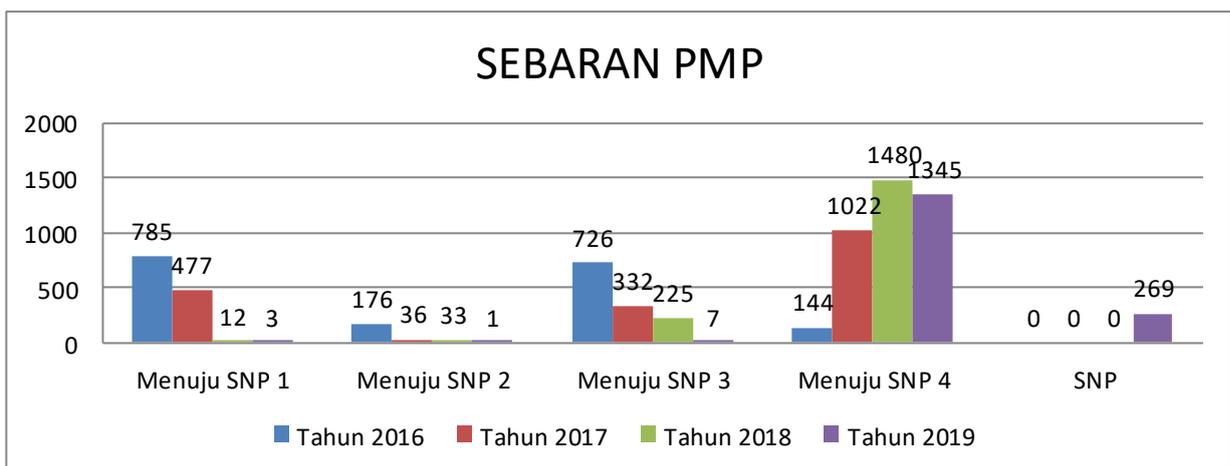


Gambar 1.5 Tren Peta Mutu Pendidikan Jenjang SD

Jika dilihat secara lebih detail capaian untuk semua standar juga terlihat adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d. 2019.



Gambar 1.6 Tren Peta Mutu Pendidikan Jenjang SD Kab/Kota

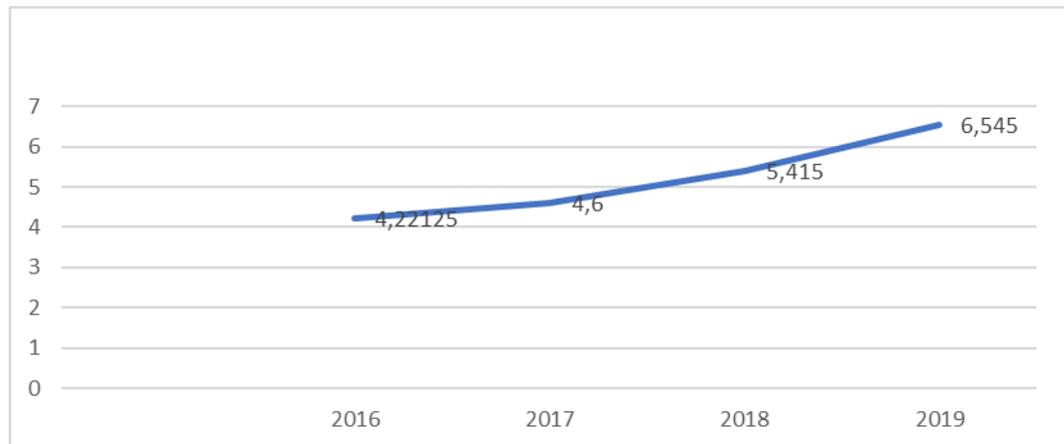


Gambar 1.7 Pemetaan Mutu Jenjang SD Berdasarkan Kategori Capaian SNP

Mayoritas SD sebanyak 1350 sekolah dari 1625 sekolah yang mengirim data PMP Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4 dan ada 269 sekolah berada pada kategori SNP. Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah

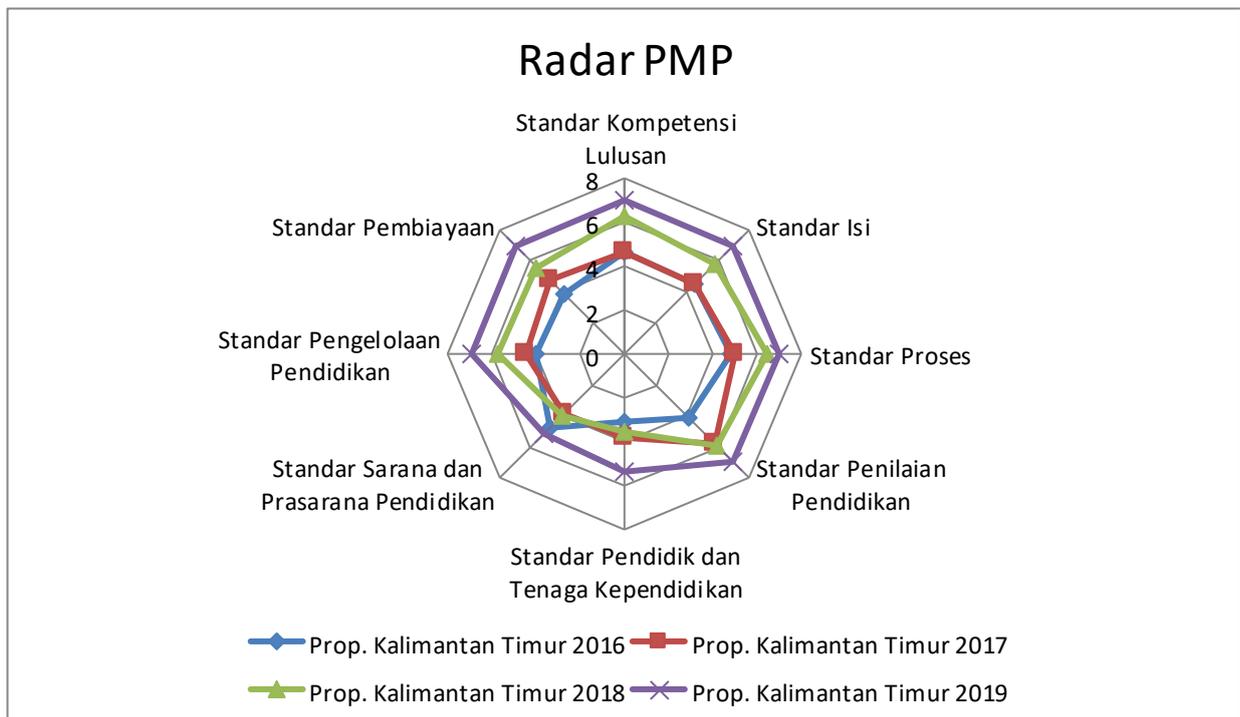
sekolah yang berada pada kategori menuju SNP 1, SNP 2, SNP 3, dan SNP 4 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori SNP.

B. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP



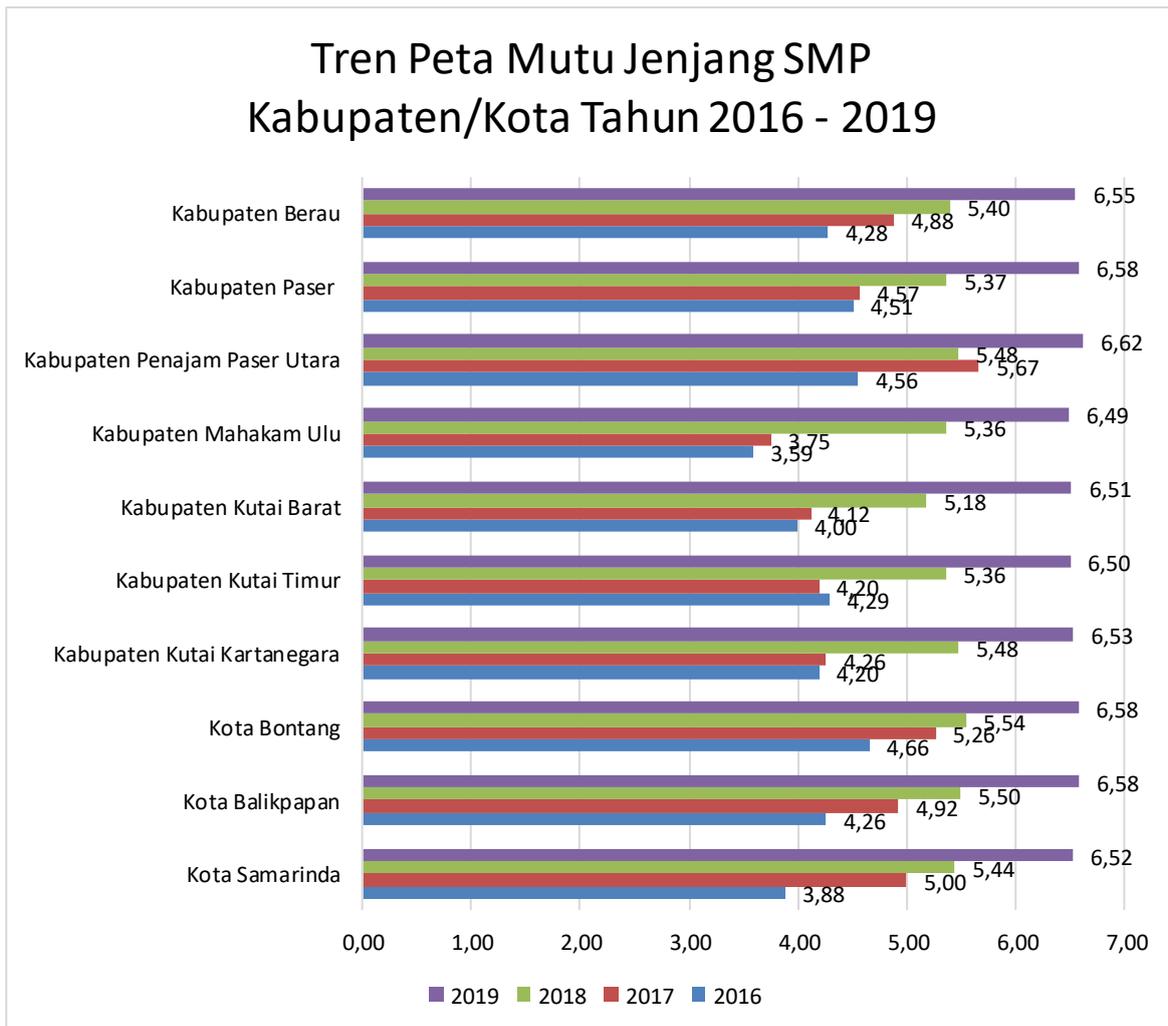
Gambar 1.8. Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP

Perbandingan capaian SNP jenjang SMP menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d 2019.

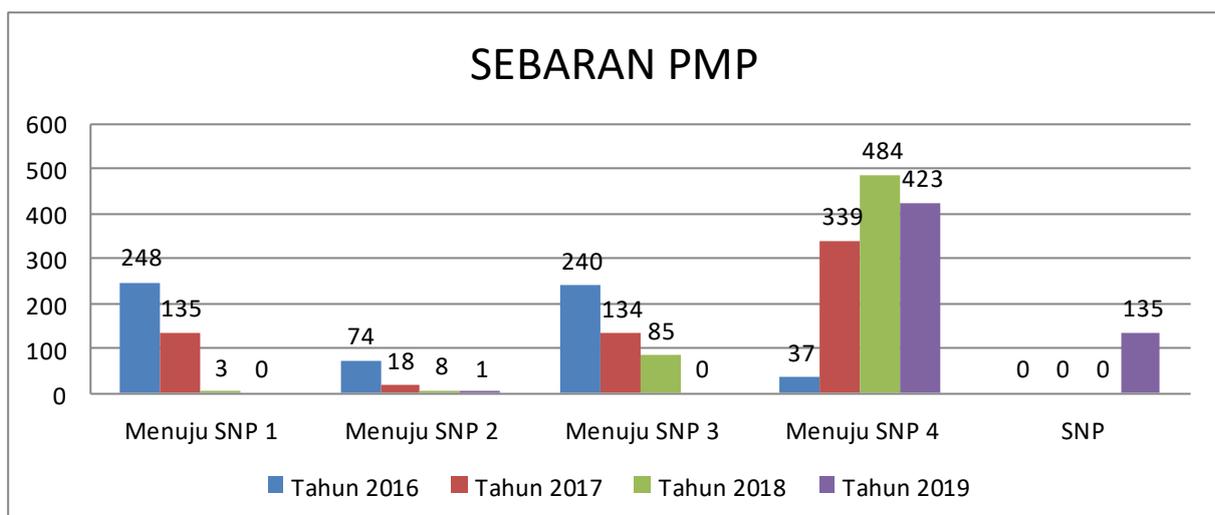


Gambar 1.9 Hasil Pemetaan Mutu Jenjang SMP

Jika dilihat secara lebih detail capaian untuk semua standar juga terlihat adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d 2019.



Gambar 1.10 Tren Peta Mutu Pendidikan Jenjang SMP

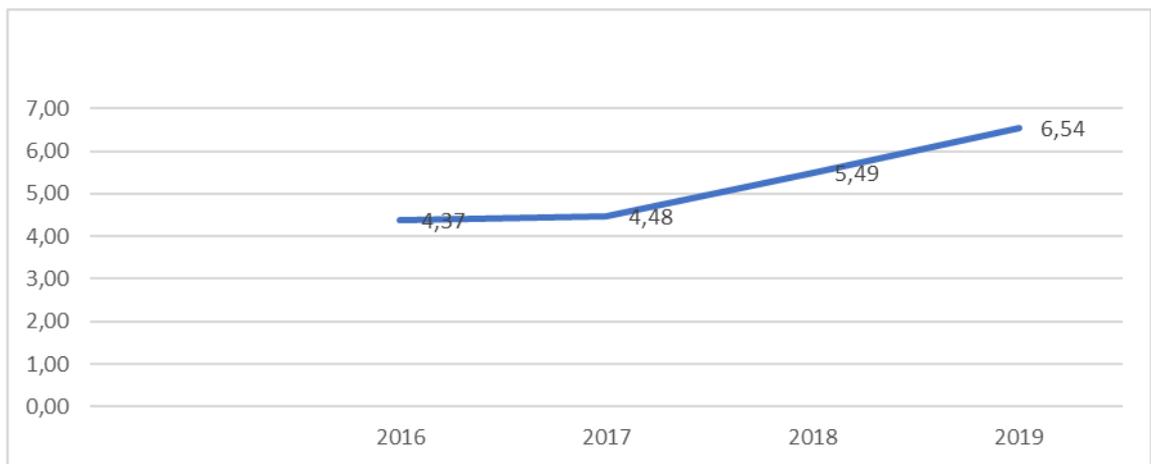


Gambar 1.11 Pemetaan Mutu Jenjang SMP Berdasarkan Kategori Capaian SNP

Mayoritas SMP sebanyak 423 sekolah dari 559 sekolah yang mengirim data PMP Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4 dan ada 135 sekolah berada pada kategori SNP.

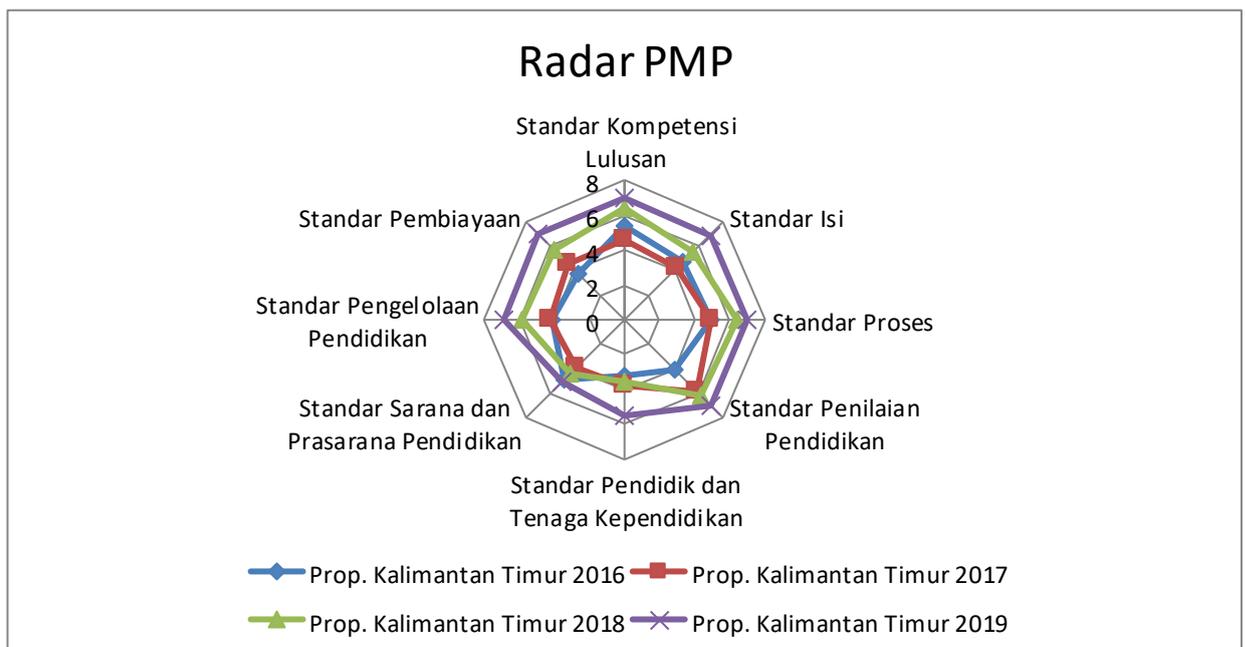
Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP1, SNP, SNP 3, dan SNP 4 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori SNP.

C. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMA



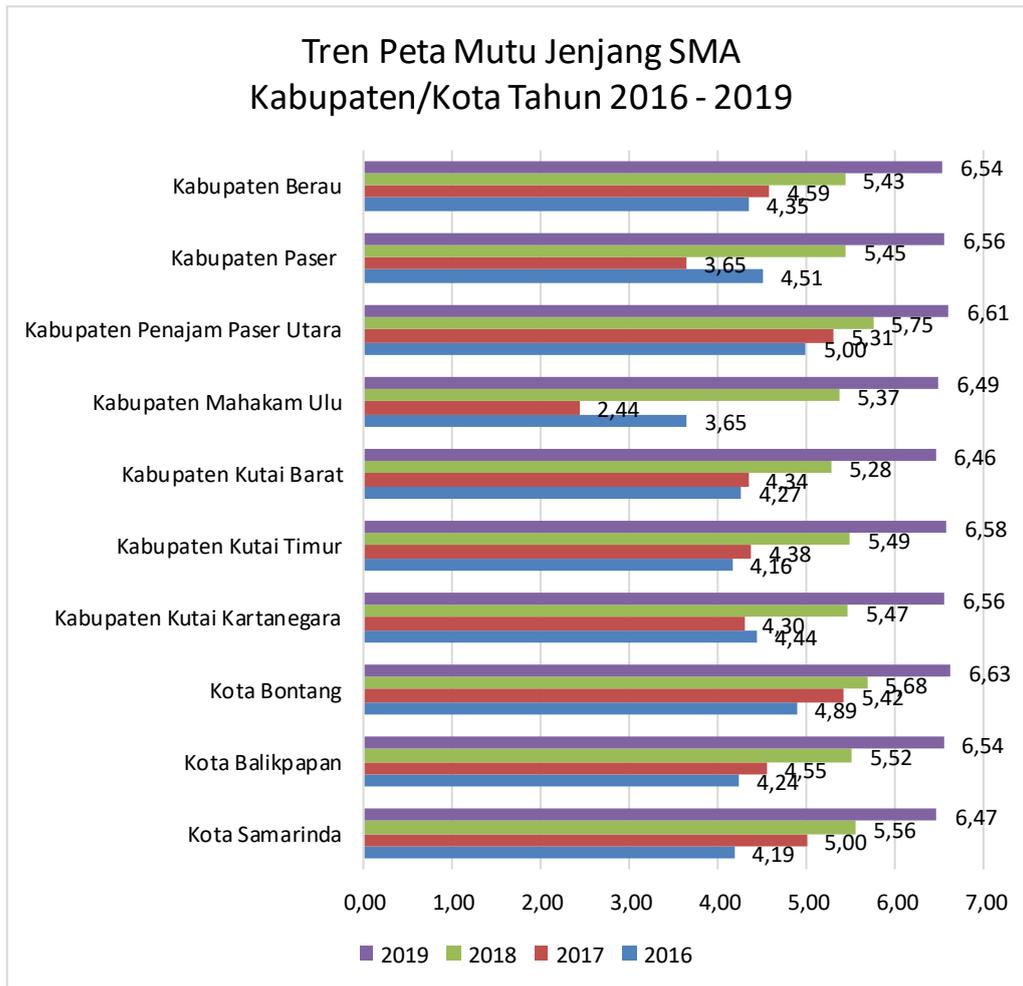
Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA

Perbandingan capaian SNP jenjang SMA menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 s

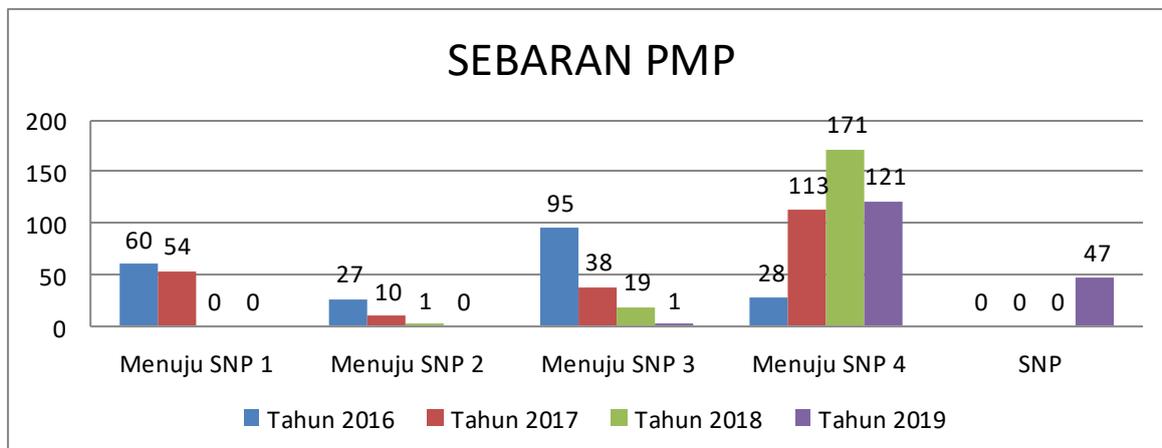


1.13 Hasil Pemetaan Mutu Jenjang SMA

Jika dilihat secara lebih detail capaian untuk semua standar juga terlihat adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d 2019.



Gambar 1.14 Tren Peta Mutu Pendidikan Jenjang SMA

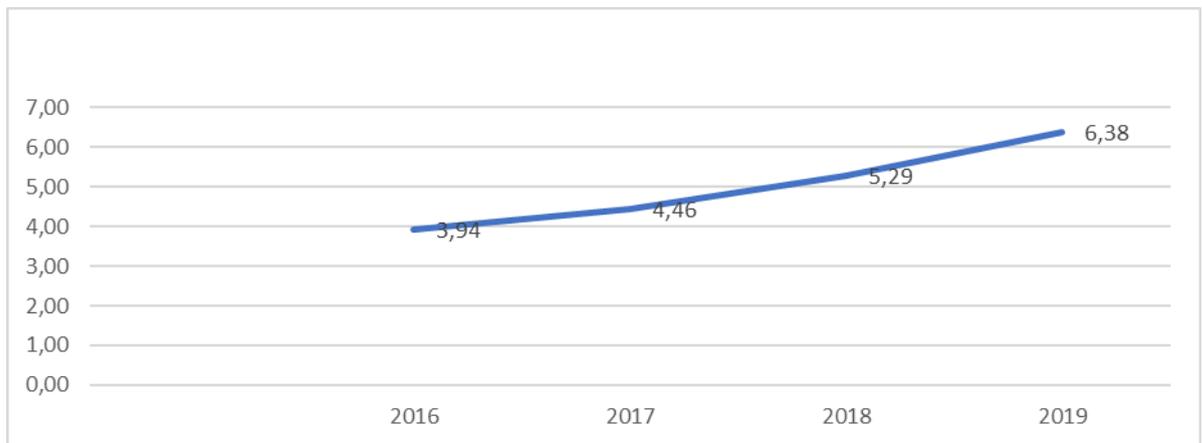


Gambar 1.15 Pemetaan Mutu Jenjang SMA Berdasarkan Kategori Capaian SNP

Mayoritas SMA sebanyak 121 sekolah dari 169 sekolah yang mengirim data PMP Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4 dan ada 47 sekolah berada pada kategori SNP.

Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP1, SNP, SNP 3, dan SNP 4 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori SNP.

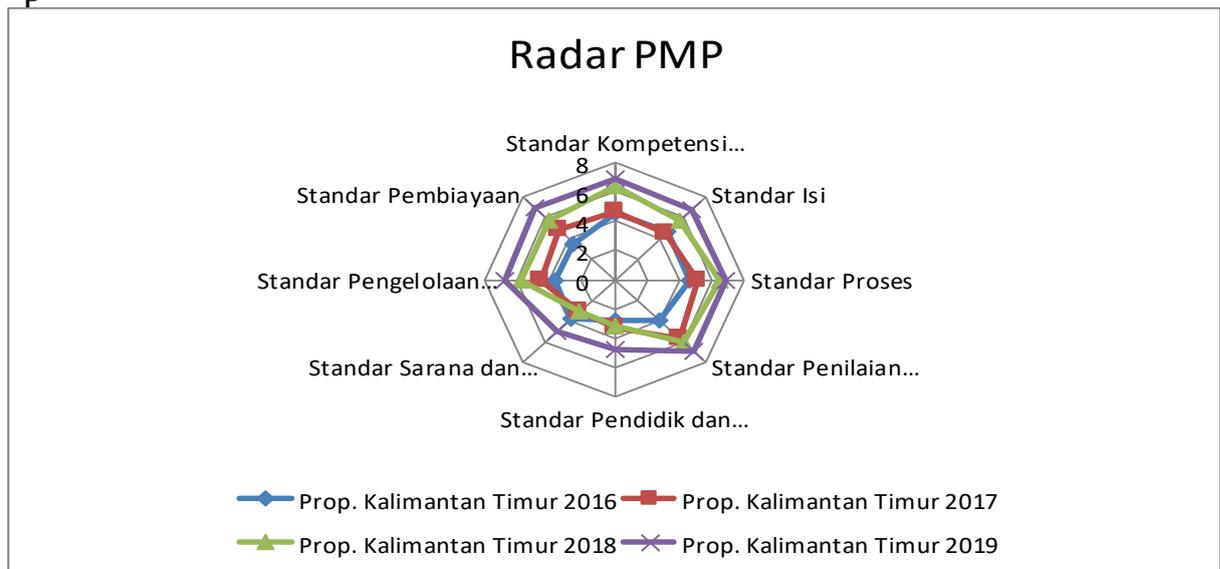
D. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMK



Gambar 1.16 Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK

Perbandingan capaian SNP jenjang SMK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d 2019.

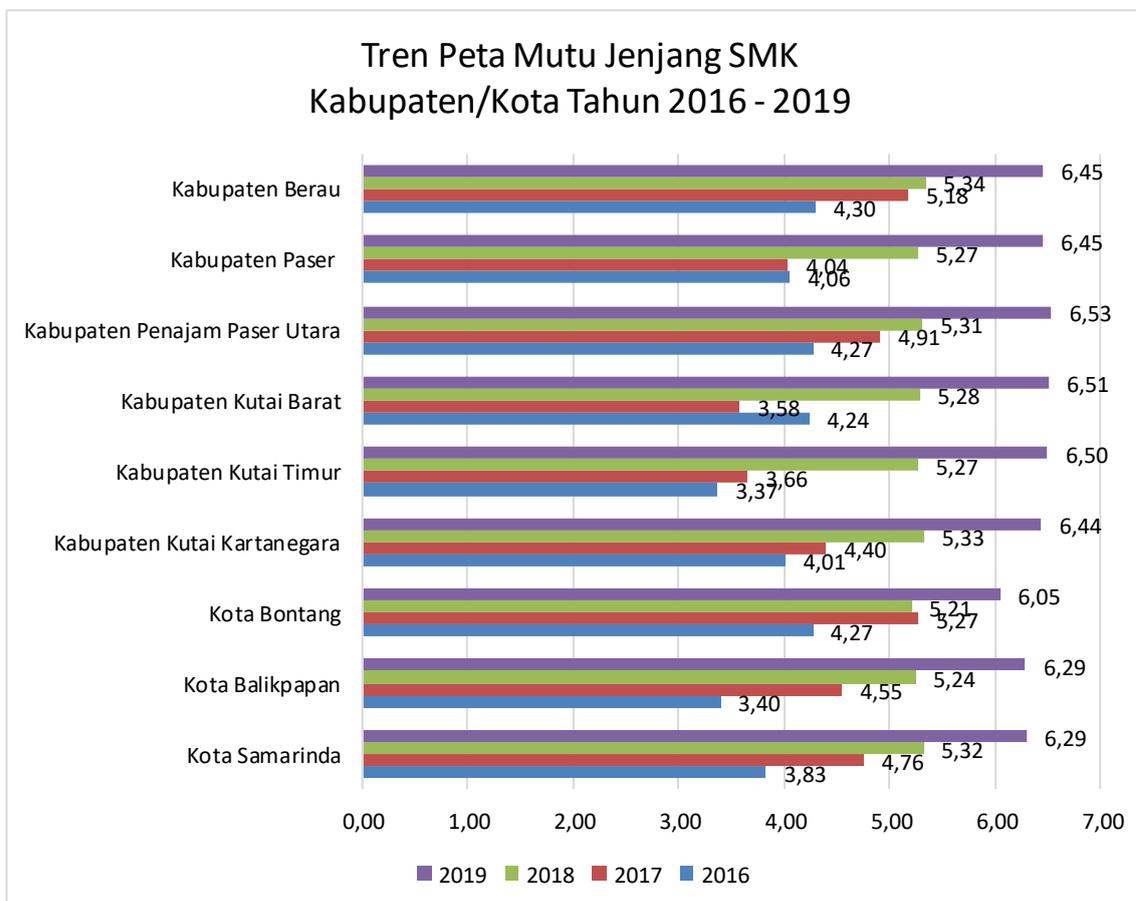
P



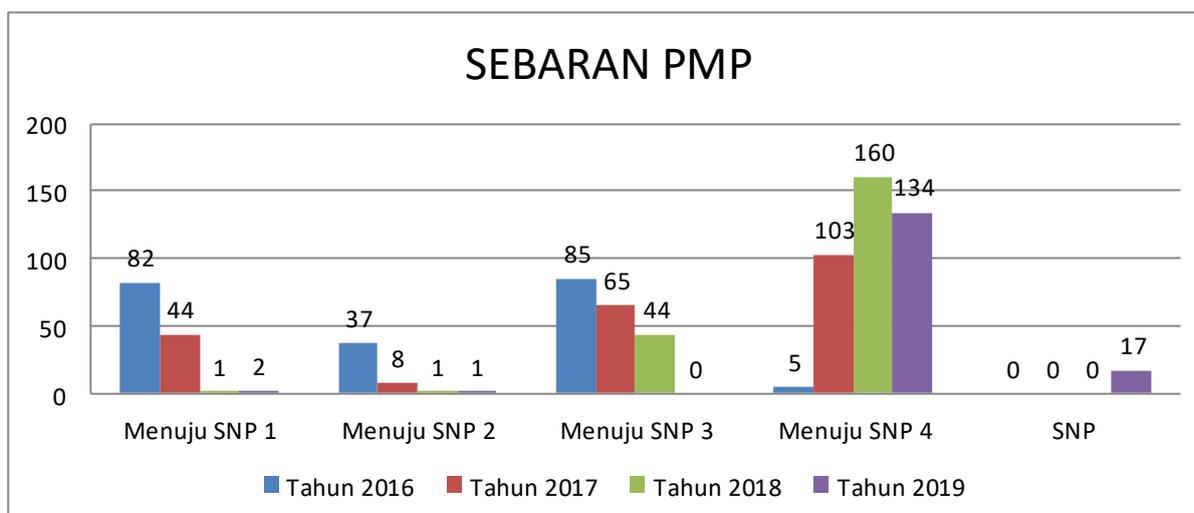
b

Gambar 1.17 Hasil Pemetaan Mutu Jenjang SMK

Jika dilihat secara lebih detail capaian untuk semua standar juga terlihat adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d. 2019.



Gambar 1.18. Tren Peta Mutu Pendidikan Jenjang SMK



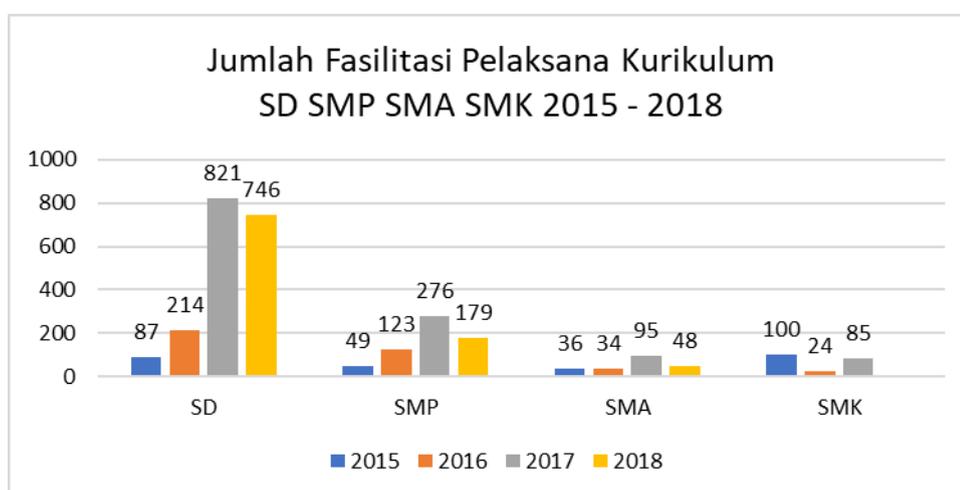
Gambar 1.19 Pemetaan Mutu Jenjang SMK Berdasarkan Kategori Capaian SNP

Mayoritas SMK sebanyak 134 sekolah dari 154 sekolah yang mengirim data PMP Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4 dan ada 17 sekolah berada pada kategori SNP.

Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP1, SNP, SNP 3 dan SNP 4 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori SNP.

2. SUPERVISI DAN FASILITASI SATUAN PENDIDIKAN

Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan dilaksanakan sejak tahun 2015-2019 melalui Program Pelatihan Sekolah Pelaksana Kurikulum, Pendampingan Sekolah Menuju SNP (Sekolah model/rujukan/binaan) dan Supervisi satuan pendidikan.



Gambar 1.20 Fasilitasi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2015-2019

Pengembangan sekolah model telah dilakukan sejak tahun 2016. Kegiatan kegiatan yang dilakukan meliputi Bimtek, pendampingan dan supervisi, monev. Sekolah model/rujukan/binaan mendapatkan bimbingan dalam pengembangan sekolah menuju peningkatan mutu di 8 standar.

Tabel 1.3 Jumlah sekolah model sekolah imbas tahun 2016 s.d 2019

No	Kabupaten/Kota	2016		2017		2018		2019	
		SKL Model	SKL Imbas						
1	Samarinda	17	59	17	59	17	59	27	59
2	Balikpapan	20	60	20	60	20	60	20	60
3	Bontang	20	57	20	57	20	57	20	57
4	Kutai Kartanegara	21	59	21	59	21	59	22	59
5	Kutai Timur	20	53	20	53	20	53	20	53

No	Kabupaten/Kota	2016		2017		2018		2019	
		SKL Model	SKL Imbas						
6	Kutai Barat	20	59	20	59	20	59	20	59
7	Berau	19	65	19	65	19	65	19	65
8	Paser	20	62	20	62	20	62	20	62
9	Penajam Paser Utara	20	62	20	62	20	62	20	62
10	Mahakam Ulu	12	10	12	10	12	10	12	10
	Jumlah	189	546	189	546	189	546	200	546

Sekolah Model dengan rincian:

Tabel 1.4 Rincian sekolah model tahun 2016 s.d 2019

NO	KAB/ KOTA	SD	SMP	SMA	SMK	JUMLAH
1	Samarinda	13	4	6	4	27
2	Balikpapan	8	7	3	2	20
3	Bontang	9	6	3	2	20
4	Kutai Kartanegara	10	7	4	1	22
5	Kutai Timur	11	5	2	2	20
6	Kutai Barat	8	8	2	2	20
7	Berau	10	6	2	1	19
8	Paser	7	8	3	2	20
9	Penajam Paser Utara	10	6	2	2	20
10	Mahakam Ulu	8	2	2	0	12
	Jumlah	94	59	29	18	200

Sekolah Imbas dengan rincian:

Tabel 1.4 Rincian sekolah imbas tahun 2016 s.d 2019

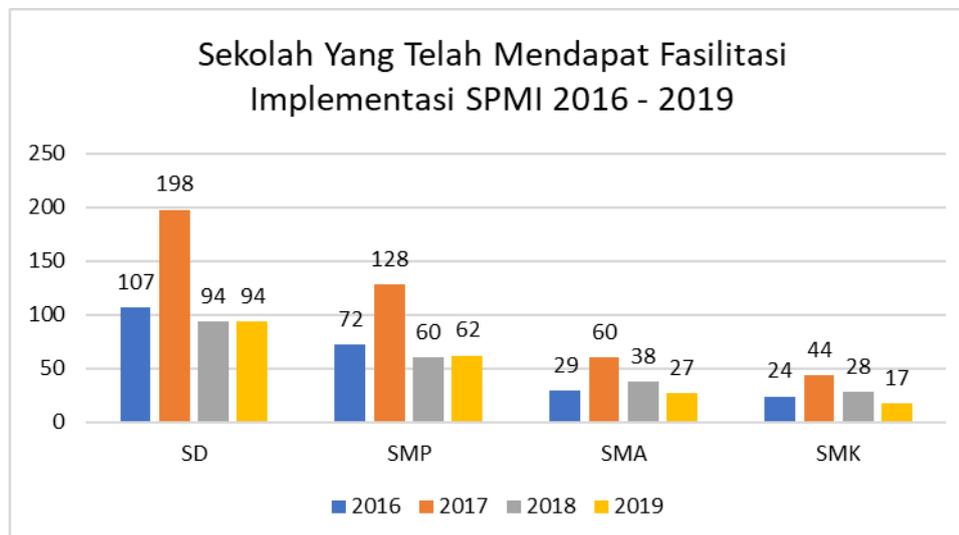
NO	KAB/ KOTA	SD	SMP	SMA	SMK	JUMLAH
1	Samarinda	15	15	14	15	59
2	Balikpapan	24	21	9	6	60
3	Bontang	25	18	8	6	57
4	Kutai Kartanegara	24	22	12	1	59
5	Kutai Timur	32	12	3	6	53
6	Kutai Barat	25	22	7	5	59
7	Berau	39	17	6	3	65
8	Paser	23	24	9	6	62
9	Penajam Paser Utara	32	19	5	6	62
10	Mahakam Ulu	6	3	1	0	10

NO	KAB/ KOTA	SD	SMP	SMA	SMK	JUMLAH
	Jumlah	245	173	74	54	546

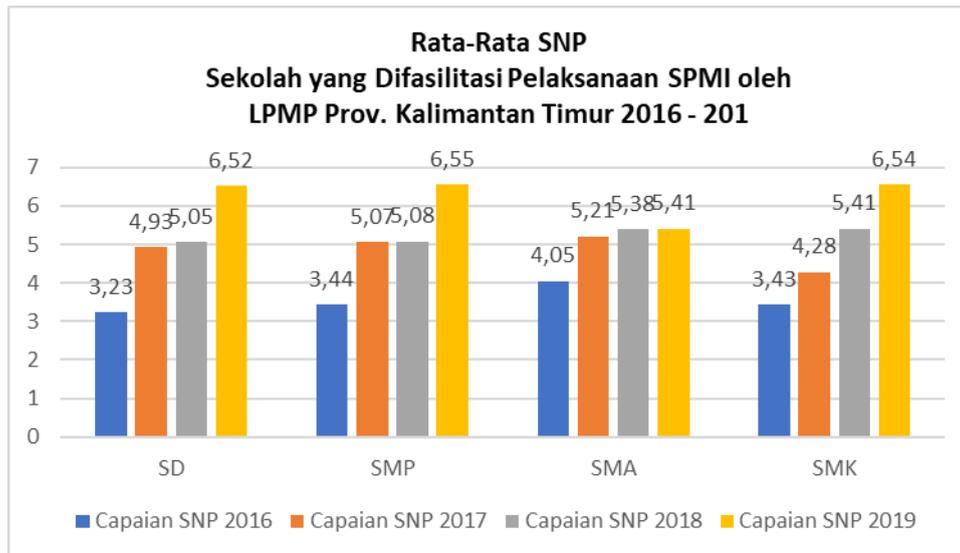
Selain sekolah model, juga telah dilakukan fasilitasi peningkatan mutu di sekolah rujukan:

Tabel 1.5 Rincian sekolah rujukan tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	2019
1	Samarinda	8
2	Balikpapan	7
3	Bontang	4
4	Kutai Kartanegara	7
5	Kutai Timur	5
6	Kutai Barat	7
7	Berau	5
8	Paser	6
9	Penajam Paser Utara	4
10	Mahakam Ulu	2
	Jumlah	55



Gambar 1.21 Fasilitasi sekolah pelaksana implementasi SPMI 2015-2019

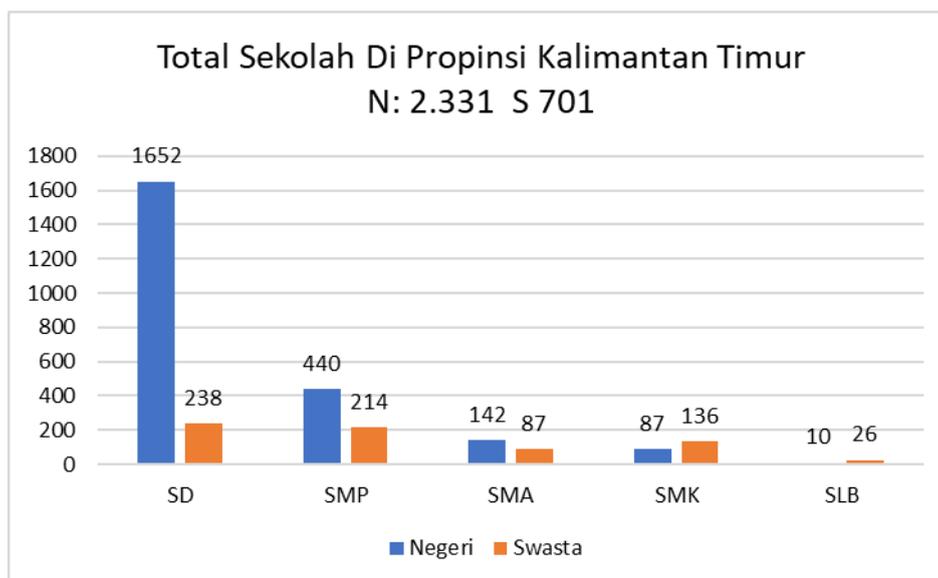


Gambar 1.22 Rata-rata Capaian SNP Sekolah yang Difasilitasi

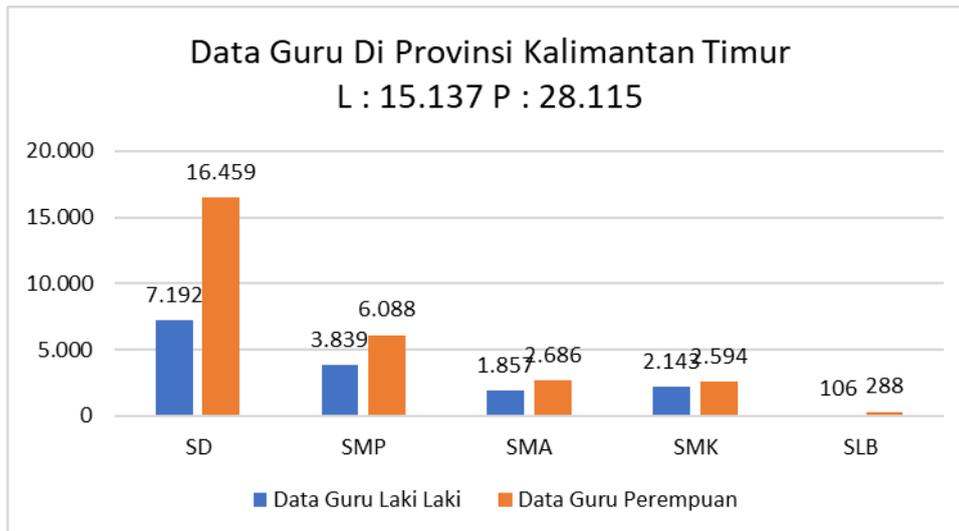
Terdapat peningkatan dalam capaian SNP pada sekolah sekolah yang difasilitasi oleh LPMP Kalimantan Timur.

3. DATA POKOK KEPENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

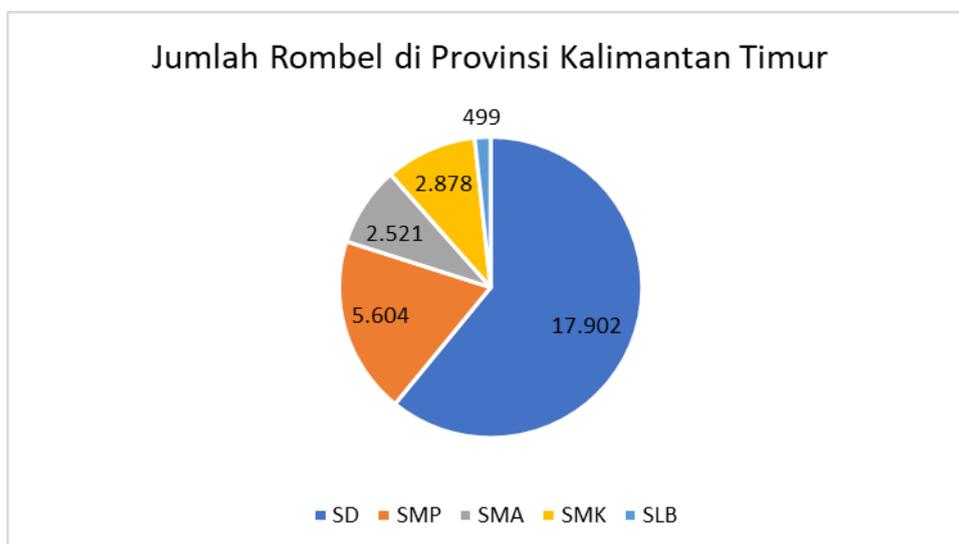
Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 10 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah tugas dari LPMP Kalimantan Timur. Adapun gambaran jumlah sekolah, guru, dan rombel adalah sebagai berikut:



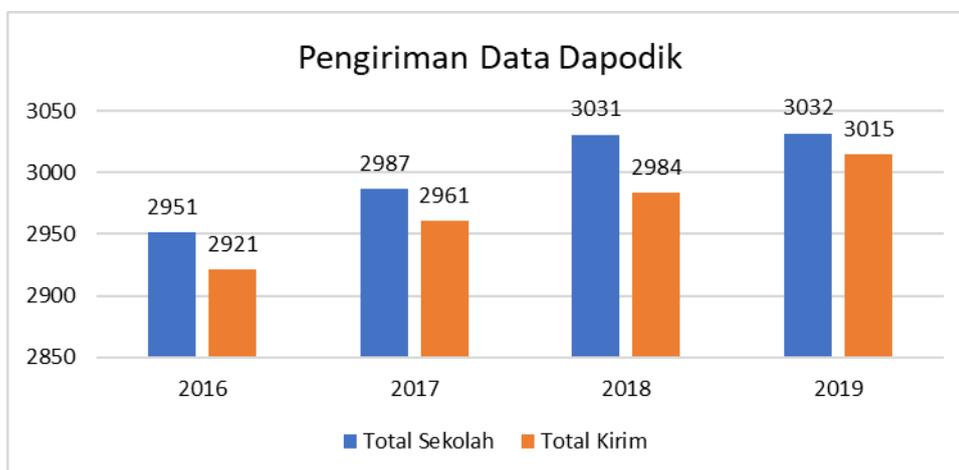
Gambar 1.23 Jumlah sekolah di Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: Dapodikdasmen Semester Genap Tahun 2019/2020)



Gambar 1.24 Jumlah Guru di Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 1.25 Jumlah Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur

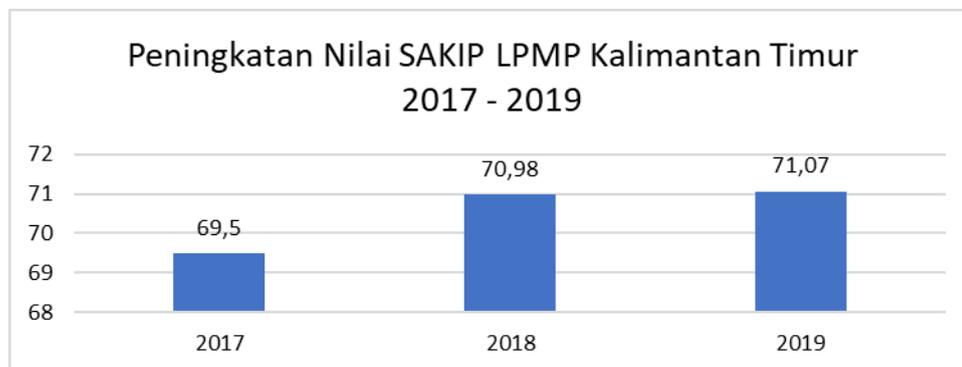


Gambar 1.26 Progres pengiriman dapodik tahun 2016-2019

4. TATA KELOLA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi enam komponen yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidi, dan evaluasi kinerja.

Nilai SAKIP yang diperoleh LPMP Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2017 dengan predikat B, meningkat menjadi BB pada tahun 2018 dan 2019 dengan nilai capaian yang terus mengalami peningkatan.



Gambar 1.27 Tren Peningkatan Nilai SAKIP

B. Isu Strategis yang Berkembang

1. Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan dan Keteladanan

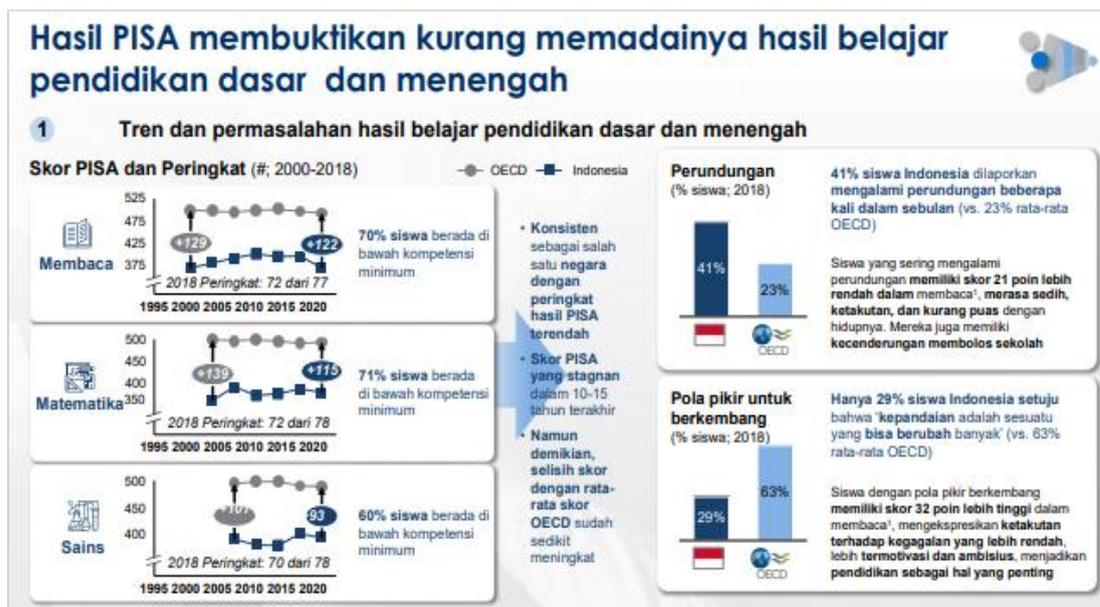
Penanaman dan pengembangan karakter di sekolah belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perilaku negatif siswa di sekolah dan di luar sekolah sangat memprihatinkan. Tawuran antar siswa, kurangnya kesantunan, kejujuran, disiplin adalah beberapa contoh yang tengah melanda para siswa. Pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan lebih banyak melalui proses pembelajaran dan kurang menekankan pada proses pembelajaran dan kurang memprioritaskan proses, pembiasaan, keteladanan dan penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembinaan ahlak mulia yang didukung dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat secara proporsional. Perlu dilakukan upaya secara intensif, ekstensif, holistik dan terprogram. Penguatan pendidikan karakter akan menjadi tantangan berat bagi pendidikan dengan terwujudnya Profil pelajar Pancasila yang Berima bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esas dan Berakhlak mulia, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif, Bergotong Royong dan Berkebhinekaan Global.

2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran (*softskill*, 6 literasi dasar, kompetensi abad ke-21)

Tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penguasaan terhadap iptek adalah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Namun demikian penguasaan iptek semata tidaklah cukup, karena kemajuan bangsa selain ditentukan pada penguasaan terhadap *hardskill* juga pada penguasaan *softskill*, yaitu kemampuan pemanfaatan iptek bagi kemaslahatan manusia. Kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, kreatifitas dan inovasi adalah kemampuan yang harus ada di samping kemampuan dalam iptek., Sementara ini, Pendidikan lebih menekankan pada penguasaan *hard skills* dan kurang mengembangkan kemampuan soft skills siswa. Untuk itu pendidikan perlu meningkatkan 6 literasi dasar:

- Literasi Baca Tulis;
- Numerasi;
- Literasi Sains;
- Literasi Finansial;
- Literasi Digital;
- Literasi Budaya dan Kewargaan.



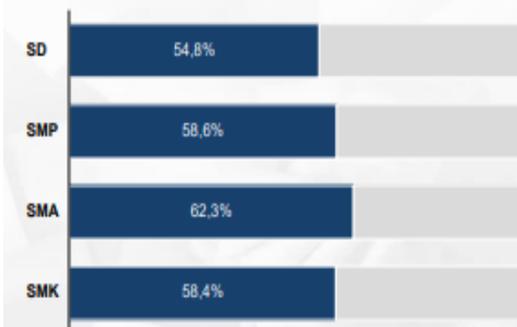
Gambar 1.28 Tren permasalahan hasil belajar

Kemampuan guru-guru di Indonesia masih belum sebaik standar yang diharapkan



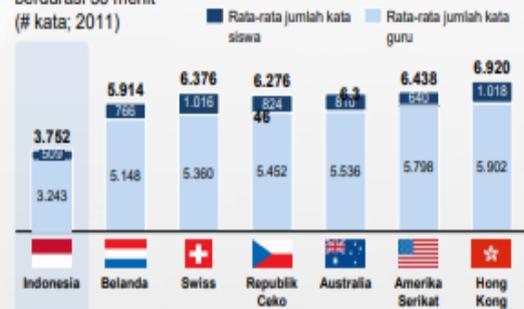
2 Kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar

Skor Kompetensi Guru (UKG)
(% dari 100; 2019)



Rata-rata skor kompetensi guru
57 dari 100

Rata-rata kata yang diucapkan dalam mata pelajaran berdurasi 50 menit (# kata; 2011)



Hanya 3% dari semua kalimat yang diucapkan oleh guru yang lebih dari 23 kata; jauh lebih rendah dari negara lain sebesar 25-41%

Pertanyaan guru cenderung dangkal karena ~90% jawaban siswa hanya satu kata dan jarang melibatkan kemampuan analisis tinggi (*higher order thinking*)

Gambar 1.29 Kesenjangan dalam Keefektifan Mengajar dan Cara Mengajar

3. Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan Merdeka Belajar, ada empat pokok kebijakan belajar jenjang pendidik dasar dan menengah, yaitu:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan memperbesar kewenangan guru dan sekolah;
2. Ujian Nasional yang dihapuskan dan pelaksanaan Asesmen Nasional sebagai pengganti;
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lebih sederhana; dan
4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang lebih fleksibel.

Potensi dan Permasalahan

Penyusunan rencana strategis LPMP Kalimantan Timur perlu memperhatikan analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dengan cara mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki LPMP Provinsi Kalimantan Timur saat ini.

A. Potensi yang Dimiliki

Mengacu kepada Rencana Strategis Kemdikbud tahun 2020 - 2024, beberapa potensi

yang bisa menjadi perhatian, adalah:

1. Memiliki jaringan kerja dan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan.
2. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti fasilitasi, pemetaan dan pengembangan sistem informasi serta pelayanan dalam berbagai kegiatan.
3. Sumber daya manusia yang memadai; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki ketersediaan sumberdaya manusia sejumlah 70 Orang PNS dan 56 orang tenaga kontrak. Dari 71 orang PNS memiliki kualifikasi pendidikan S-3 sejumlah 2 orang, S-2 sejumlah 13 orang, S-1 sejumlah 36 orang D3 sejumlah 10 dan SMA/ sederajat sejumlah 9 orang. Kompetensi yang beragam telah dimiliki oleh seluruh sumberdaya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peta jabatan dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2019 yang ada untuk menunjang pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Sarana dan Prasarana yang menunjang; dalam rentang waktu 2015–2019 LPMP Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan beragam inovasi dalam melengkapi sarana prasarana dan fasilitas fasilitas yang menunjang peningkatan kualitas pelayanan LPMP Prov. Kalimantan Timur. Fasilitas seperti Kantor utama, ULT, Perpustakaan, Asrama, Ruang Kelas, fasilitas olah raga, taman dan lingkungan telah mengalami peningkatan yang sangat drastis dari masa sebelumnya. Semua upaya peningkatan kualitas dan kapasitas di maksudkan agar semakin meningkatkan kinerja seluruh pegawai LPMP Kalimantan Timur dan LPMP Kalimantan Timur sebagai sebuah UPT pelaksana Kemendikbud dalam melaksanakan program peningkatan mutu.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi di bidang pendidikan dasar dan menengah yang perlu dipecahkan melalui penetapan serangkaian kebijakan-kebijakan/strategi sebagai landasan bagi penyusunan program-program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah Sekolah Yang Mencapai Kategori “SNP”

Tujuan penjaminan mutu adalah untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang

berkualitas. Upaya-upaya ke arah pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Pedoman ini tertuang pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Standar itu meliputi:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian;
- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Pengelolaan;
- g. Standar Sarana dan Prasarana; dan
- h. Standar Pembiayaan.

Berdasarkan capaian rapor mutu tahun 2019 terlihat masih rendahnya sekolah sekolah dengan capaian “SNP”. Hal ini menjadi tantangan untuk dapat terus di tingkatkan melalui pelaksanaan program di 2020-2024.

Tabel 1.6 Sekolah yang Telah Mencapai Kategori “SNP” Tahun 2019

Jenjang	Jumlah	SNP	%
SD	1652	269	14,23
SMP	440	135	20,64
SMA	142	47	20,52
SMK	87	17	7,62
Total	2996	468	15,76

2. Tata Kelola dan Pelayanan Organisasi Perlu Terus Ditingkatkan Kualitasnya

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

LPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 memperoleh nilai SAKIP 71.07 dengan capaian BB. Nilai capaian yang di peroleh selalu meningkat untuk setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa LPMP terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam tata kelola dan pelayanan organisasi. Upaya peningkatan masih terus di upayakan dengan mengacu pada aspek aspek dalam implementasi SAKIP yang meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pengukuran kinerja
- c. Pelaporan kinerja dan review laporan kinerja
- d. Evaluasi kinerja
- e. Capaian kinerja

C. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Adanya potensi dan permasalahan yang dihadapi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

Tabel 1.7 Matriks Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Adanya peta mutu Pendidikan yang dihasilkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pemberian layanan fasilitasi dan supervisi dalam upaya peningkatan sekolah yang mencapai “SNP”	Ketergantungan pada system pengumpulan data mutu yang dikembangkan oleh pusat dan belum maksimalnya alokasi anggaran bagi pengembangan sistem pengumpulan data	Peningkatan kapasitas hubungan kemitraan dengan para stakeholder pendidikan Terjalin secara intensif dalam upaya mengoptimalkan pengembangan system pengumpulan data mutu pendidikan	Hasil pemetaan mutu pendidikan tidak optimal dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam memberikan intervensi yang diperlukan bagi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Validitas data hasil

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	kepada para operator dan pengawas yang akan melakukan supervisi ke sekolah dalam rangka mutu pendidikan		pemetaan mutu pendidikan
Tersedianya personal yang memiliki kualifikasi cukup memadai yang terdiri dari jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu (widyaiswara dan pengembang teknologi pembelajaran)	Masih kurangnya kemampuan teknologi informasi dalam pengembangan aplikasi online dalam mengakses hasil peta mutu sekolah yang ada dipropinsi Kalimantan Timur dan aplikasi lainnya yang dapat mempercepat proses pekerjaan	Pentingnya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SNP	Tidak optimalnya Fasilitasi dalam pemenuhan SDM TIK, perbaikan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan sumber daya pendidikan
Tata kelola dan pelayanan organisasi yang baik perlu di tingkatkan kualitasnya sehingga akan berdampak bagi peningkatan kinerja dan pelayanan yang prima	Kurangnya terintegrasinya layanan yang di lakukan berbagai unsur	Peningkatan pelayanan penjaminan mutu pendidikan kepada dinas pendidikan, sekolah dan stakeholders lainnya dengan membuat inovasi inovasi pelayanan yang baru	Kewenangan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang terbatas

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam melaksanakan Perencanaan Strategis Lembaga yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis, serta Indikator target kinerja yang merupakan satu kesatuan yang utuh menghasilkan rencana strategis lembaga.

A. TUJUAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN STRATEGIS

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta untuk memastikan kesesuaian antara Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Timur, maka disusunlah Tujuan Strategis Dan Indikator Kinerja LPMP Kalimantan Timur.

Tabel 2.1 Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan Strategis

KODE	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN STRATEGIS
TS1	Meningkatkan mutu satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Persentase Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB di Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai indeks mutu minimum 75
TS2	Memperkuat sistem tata Kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Predikat Akuntabilitas Kinerja Lembaga A

Berdasarkan Tabel 2.1, Indikator Kinerja Tujuan Strategis disusun untuk dapat mengukur ketercapaian dari Tujuan Strategis. Indikator tersebut diharapkan dapat tercapai dalam periode Renstra Tahun 2020 s.d. 2024.

B. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Dalam upaya merealisasikan tujuan strategis LPMP Kalimantan Timur pada tahun 2020–2024 LPMP Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis LPMP Kalimantan Timur diturunkan atau *dibreakdown* dari tujuan strategis tujuan strategis LPMP Kalimantan Timur, sebagaimana disajikan Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis LPMP Kalimantan Timur 2020–2024

TUJUAN STRATEGIS (TS1)	TUJUAN STRATEGIS (TS2)
Meningkatkan mutu satuan pendidikan anak usia dini, pendidikandasar dan pendidikan menengah	Memperkuat sistem tata kelola yang partisipatif, transparan,dan akuntabel



SASARAN STRATEGIS (SS1)	SASARAN STRATEGIS (SS2)
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Terwujudnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang baik

Sasaran Strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk dapat merealisasikan terwujudnya Tujuan Strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai macam program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Sasaran

Dalam upaya mencapai Sasaran Strategis Pertama (SS.1) Terwujudnya penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ditetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis pertama

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
IKK 1	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75
IKK 2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
IKK 3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan

Dalam upaya mencapai Sasaran Strategis Kedua (SS.2) Terwujudnya Tata Kelola LPMP Kalimantan Timur yang baik, ditetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis Kedua

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
IKK 4	Predikat Sakip Satker minimal "A"
IKK 5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Satker minimal 97

Perumusan IKK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana disajikan tabel-tabel tersebut dirumuskan dari sasaran strategis LPMP Kalimantan Timur dengan tetap memperhatikan kesesuaian dari Tujuan, sasaran dan Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang dinyatakan Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK). Keterkaitan/keselarasan antara indikator kinerja sasaran strategis kementerian, Indikator kinerja program ditjen paud dikdasmen dan Indikator Kinerja Kegiatan LPMP Kalimantan Timur disajikan pada Gambar 2.1.

IKSS Kementerian

IKSS 2.2. Persentase siswa dengan nilai assesment kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum.

IKSS 2.3. Persentase siswa dengan nilai assesment kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum.

IKP Ditjen Paudikdasmen

IKP 3.2.1. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD,SD,SMP,SMA dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi).

IKP 3.4.2. Prsentase siswa dengan nilai survei karakter memenuhi tingkat minimum.

IKP 3.5.4. Persentase data pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan.

IKP 3.6.1 Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen minimal BB

IKK LPMP Prov Kaltim

IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD,SMP, SMA dan SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75

IKK 1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.

IKK 1.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah, akurat, terbaru dan berkelanjutan.

IKK 2.1. Skor SAKIP predikat A

IKK 2.2 Nilai kinerja pelaksanaan RKAKL 97

Gambar 2.1. Keselarasan IKSS, IKP dan IKK

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang RPJM IV 2020–2024 yakni mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif. Hal tersebut sesuai dengan pencapaian Visi periode kedua Presiden Joko Widodo untuk tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong- royong”.

Untuk mendukung ketercapaian visi tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsi akan menjalankan salah satu misi nawacita kedua yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia dengan dua agenda:

- (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,
- (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya mendukung ketercapaian sasaran strategis meningkatnya Penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 2020-2024 untuk mencapai sasaran strategis tersebut mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam Mendukung Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Agenda Pembangunan	Arah kebijakan	Strategi
Meningkatkan SDM Yang Berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pemerataan Layanan pendidikan berkualitas	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif

Peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada tabel di atas menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Prinsip mendasar yang menjadi pedoman arah kebijakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur adalah mendukung arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya serta bersinergi dengan instansi lain, baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

Strategi Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan

Adapun strategi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tugas dan fungsinya, dalam rangka peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan adalah:

1. Melaksanakan pemetaan mutu satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SLB) dengan lebih berkualitas
2. Melaksanakan supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan (SD, SMP, SMA dan SLB) secara lebih efektif dan efisien terutama kepada satuan pendidikan dengan nilai SNP nya rendah
3. Melakukan pengembangan model penjaminan mutu yang bermutu dan bermanfaat
4. Menjalin kerjasama dan kemitraan yang lebih kuat serta meningkatkan sistem koordinasi dengan pemangku kepentingan di propinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kinerja satuan pendidikan.
5. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah yang inovatif dan aplikatif
6. Melaksanakan urusan administrasi LPMP secara efektif, efisien dan akuntabel

Kerangka Regulasi

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpedoman pada kerangka regulasi. Kerangka Regulasi yang relevan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMP)

Kerangka Kelembagaan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut:

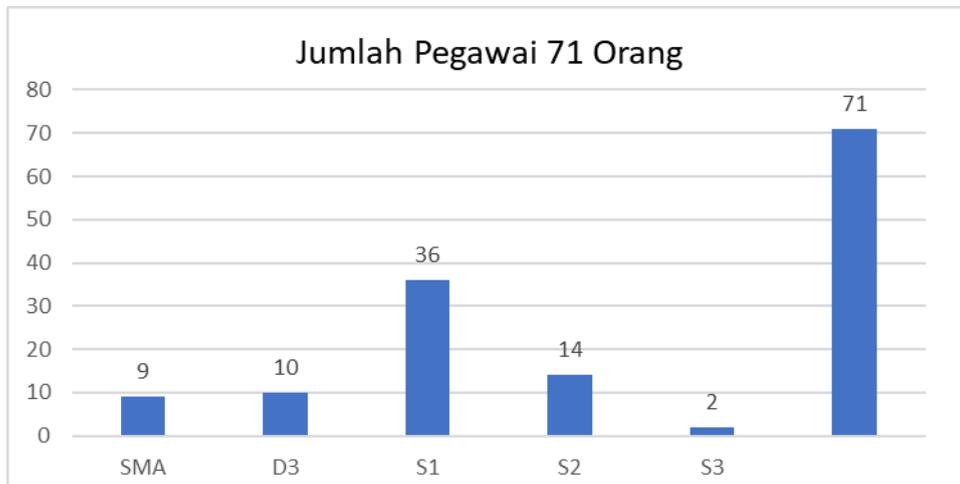
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPMP KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tatakerja unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 39:

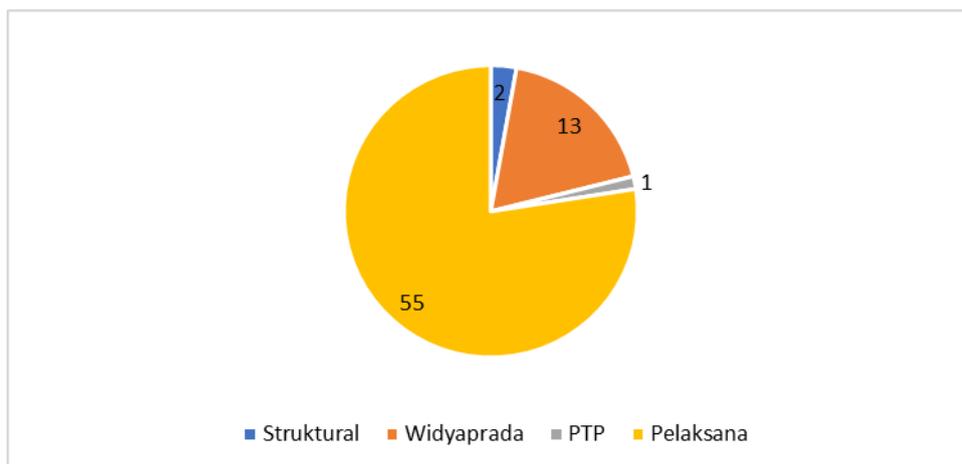


Gambar 3.1 Bagan Struktur LPMP Kalimantan Timur

GAMBARAN SDM LPMP KALIMANTAN TIMUR



Gambar 3.2 Struktur LPMP Kalimantan Timur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Gambar 3.3 Struktur LPMP Kalimantan Timur Berdasarkan Jabatan

Tugas:

LPMP Mempunyai Tugas Melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Kebijakan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Fungsi:

1. Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
2. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

3. Supervisi Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Dalam Pencapaian Standar Nasional Pendidikan;
4. Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Terhadap Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Pelaksanaan Kerja Sama Di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
6. Pelaksanaan Urusan Administrasi LPMP.

Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi sudah dimulai sejak tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 inilah kemudian dibuat Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 fase ke-1 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 fase ke-2. Pada tahun 2020, Reformasi Birokrasi akan masuk fase ke-3, yaitu sejak 2020-2024. Fase ke-1 di bawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono serta fase ke-2 dan ke-3 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025, yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi di atas adalah dalam rangka mengejar visi Reformasi Birokrasi yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2020-2024 juga memiliki komitmen untuk tetap melanjutkan berbagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi delapan area perubahan agar layanan yang berkualitas dan berintegritas dapat tumbuh dan berkembang menjadi budaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh warga di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

1. Manajemen Perubahan
 - a) Penetapan SK tim reformasi birokrasi
 - b) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Kementerian secara terus menerus agar menjadi budaya di lingkungan LPMP Kalimantan

Timur

2. Penguatan Peraturan Perundang Undangan
 - a) Melakukan sosialisasi kebijakan terkait peraturan perundang undangan
3. Penguatan dan penataan organisasi
 - a) Penataan organisasi berdasarkan peta proses bisnis
4. Penataan Tata Laksana
 - a) Melakukan pengembangan pelayanan publik
 - b) Memperkuat sistem pengarsipan
5. Penguatan Sistem Manajemen SDM
 - a) Melakukan penataan dan penguatan SDM PNS di lingkungan LPMP Kalimantan Timur
 - b) Penerapan penilaian kinerja sesuai SKP dengan sistem online sesuai kinerja masing masing individu
 - c) Sinkronisasi dan up dating data pegawai yang terjadwalkan secara berkala
6. Penguatan Akuntabilitas
 - a) Penerapan sistem/aplikasi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan
 - b) Penyampaian laporan secara periodik dan online serta terintegrasi
 - c) Peningkatan kapasitas SDM dalam implelementasi SAKIP
 - d) Internalalisasi SAKIP dan meningkatkan sinergitas dalam mendorong budaya kerja
7. Penguatan Pengawasan
 - a) Optimalisasi peran SPI dan SPIP
 - b) Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat
 - c) Mengupayakan adanya reward dan punishment
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a) Menyusun standar pelayanan dan SOP pelayanan publik
 - b) Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik.
 - c) Mengadakan sistem pengelolaan pengaduan
 - d) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, akan senantiasa berusaha untuk melaksanakan setiap program sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam reformasi birokrasi, yakni reformasi yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), anggaran berbasis kinerja, organisasi (Kelembagaan) berbasis kinerja, dan sistem sumber daya aparatur yang berorientasi pada kinerja yang menjadi prioritas utama. Jika semua program tersebut terlaksana dengan baik dan benar, maka reformasi pelayanan publik yang berkinerja baik pun akan lebih mudah dilakukan.

Pada tahun 2019 dan tahun 2020, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 2019 baik dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) maupun pada Evaluasi Kinerja Akhir (EKA).

Adapun jenis penghargaan yang telah diraih dalam hal pelaksanaan kinerja anggaran sebagai berikut:



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden RI yang diamanahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan dua sasaran kegiatan yang dikenal dengan sasaran strategis. Sasaran strategis ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran kegiatan(sasaran strategis) diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel. 4.1. Sasaran Kegiatan (Sasaran Strategis), Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD,SMP,SMA dan SLB yang memiliki indeks capaian siswa minimal 75	26,5%	27,4%	28,3%	29,2%	30,1%
		2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5%	5%	5%	5%	5%

		3. Persentase Kab/kota yang data pokok pendidikan dasar akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95%	95,2%	95,4%	95,6%	95,8%
2.	Terwujudnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang baik	1. Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A	A	A	A	A
		2. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL	97	97,5	98	98,5	99

Tabel 4.2 Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan) dan 5 Indikator Kegiatan (Indikator Kinerja) Serta 8 Ouput/Komponen yang Sesuai, Untuk Tahun 2020-2024 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Komponen	Ouput
1.	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1. Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu)	1. Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya.	5630.001
			2. Satuan pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	5630.002
			3. Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	5630.003
			4. Satuan Pendidikan yang terverifikasi mutupendidikannya	5630.004

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Komponen	Ouput
		2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antaran sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.	1. Satuan pendidikan yang telah di supervisi dalam pencapaian SNP	5630.002
		3. Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat,terbarukan dan berkelanjutan.	1. Layanan sarana dan prasarana internal	5630.951
			2. Layanan dukungan manajemen satker	5630.970
			3. Layanan perkantoran	5630.994
2.	Terwujudnya tatakelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang baik	1. Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. 2. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL	1. Layanan sarana dan prasarana internal 2. Layanan dukungan manajemen satker 3. Layanan perkantoran	5630.951 5630.970 5630.994

Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya	409.272.000	448.432.000	491.508.000	538.891.600	591.013.560
2.	Satuan pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	3.516.482.000	3.707.652.000	3.917.939.000	4.172.386.270	4.426.833.540
3.	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	7.663.205.000	7.939.375.000	8.243.162.000	8.610.744.270	8.978.326.540
4.	Satuan pendidikan yang terverifikasi mutu pendidikannya	1.917.473.000	2.054.313.000	2.204.837.000	2.386.971.040	2.569.105.080
5.	Layanan sarana dan prasarana internal	22.904.039.000	22.958.739.000	23.018.909.000	23.091.714.700	23.164.520.400
6.	Layanan dukungan manajemen satker	3.374.547.000	3.673.320.100	4.001.970.510	4.399.637.506	4.797.304.502
7.	Layanan Perkantoran	19.294.507.000	21.279.958.700	23.463.955.570	26.106.591.783	28.749.227.996
Total Rencana Anggaran		59.079.525.000	62.061789.800	65.342.281.080	69.306.937.169	73.276.331.618

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	13.506.432.000	14.149.772.000	14.857.446.000	15.708.993.180	16.565.278.720
2.	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	3.516.482.000	3.707.652.000	3.917.939.000	4.172.386.270	4.426.833.540
3.	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	45.573.093.000	47.912.017.800	50.484.835.080	53.597.943.989	56.711.052.898
4.	Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A	A	A	A	A

No.	Indikator Kinerja	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	97	97,5	98	98,5	99

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis LPMP Kalimantan Timur disusun ini pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis lembaga serta target yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2015. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPMP akan lebih efektif, efisien, berorientasi ke masa depan dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi saat ini yang dihadapi satuan kerja baik internal maupun eksternal.

Penyusunan Renstra adalah salah satu wujud pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Dari ditetapkannya rencana strategis Lembaga maka akan dapat dilakukan penilaian kinerja berupa pengukuran kinerja yaitu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Lembaga. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan strategis lembaga.

Rencana Strategis LPMP Kalimantan Timur ini diharapkan untuk digunakan sebagaipedoman dan arah pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang hendak dicapai pada periode 2020 – 2024 ataupun sebagai pedoman dalam menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (2) Rencana/Program Pembangunan bidang anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (4)

Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semoga Rencana Strategis ini dapat membantu LPMP Kalimantan Timur, sehingga terjadi sinkronisasi rencana dengan pelaksanaannya dalam upaya melakukan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi sehingga terlaksananya Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Kalimantan Timur yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong sesuai dengan Visi LPMP Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024
4. Panduan Praktis Penyusunan Rencana Strategis UPT

LAMPIRAN

Lampiran 1b. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan di seluruh jenjang											
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	36,93	42,62	45,21	47,81	53,10					
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	107,46	104,48	102,98	101,49	100,00					
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	90,57	94,34	96,23	98,11	100,00					
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	83,98	88,39	90,59	92,80	95,00					
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang											
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	2,75	3	4	4	4					
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53,2	58,2	59,2	60,2	61,2					
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	22,9	27,4	28,3	29,2	30,1					
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	nilai	371	394	-	-	396					
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	nilai	379	385			388					
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	396	399			402					
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik											
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25	35	40	45	50					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Pancasila											
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	5	15	23	31	40					
023.03.06	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah							5.479,55	5.649,29	5.818,77	5.993,34	Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
1	Program Dukungan Manajemen							1.634,52	1.683,55	1.734,06	1.786,08	
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas											
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Predikat	BB	BB	A	A	A					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 1.1.2	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	Kategori	Sangat Baik					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKP 1.1.9	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	%	-	20	22	23	35					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 1.1.11	Persentase pedayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	%	-	68,80	79,20	89,60	100					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
2	Program Kualitas Pembelajaran							2.257,79	2.330,88	2.400,81	2.472,83	
SP 2.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah											
IKP 2.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	%	52,70	64,70	70,70	76,70	85,00					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
IKP 2.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	kab/kota	53	58,20	59,20	60,20	61,20					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 2.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	provinsi	23	27,40	28,30	29,20	30,10					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun							1.587,24	1.634,86	1.683,91	1.734,42	
SP 3.1	Meningkatnya Perluasan Akses Afiriasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun											
IKP 3.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio		0,71	0,73	0,75	0,78					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.1.2	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)	%		68,06	69,63	71,20	72,77					
IKP 3.1.3	Jumlah Kab/Kota dengan nilai kinerja sekolah (Score Card) minimum 75 (kategori tinggi)	kab/kota		56	106	156	206					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.1.4	Jumlah Provinsi dengan nilai kinerja sekolah (Score Card) minimum 75 (kategori tinggi)	provinsi		10	14	17	20					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
SP 3.2	Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah											
IKP 3.2.1	Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)	%		5	10	15	20					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.2.2	Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		4.503	6.614	8.729	10.000					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SP 3.3	Meningkatnya Karakter Peserta Didik											
IKP 3.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25	35	40	45	50					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%		58,2	59,2	60,2	61,2					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
SP 3.4	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah											
IKP 3.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	%	30	60	100	100	100					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.4.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai	%		15,86	29,92	43,98	58,04					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.4.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	%		60	68	73	82					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.4.4	Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbarukan dan Berkelanjutan	%		95	95	95	96					Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
4272	Penyedia Layanan PAUD							440,73	453,95	467,57	481,60	
SK 1	Tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata dan berkualitas							440,73	453,95	467,57	481,60	
IKK 1.1	Jumlah Peserta Didik usia 3-5 tahun yang mengikuti menerima BOPP PAUD	juta orang	6,4	8,7	10,0	11,2	12,7	4.475,50	-	-	-	DAK Non Fisik
IKK 1.2	Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	kab/kota	51,0	154	206	257	267	30,44	31,35	32,29	33,26	Dit.PAUD

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
IKK 1.3	Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%	kab/kota	84,0	135	155	175	195	14,38	14,82	15,26	15,72	Dit.PAUD
IKK 1.4	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	Lembaga		626	776	926	1.076	36,08	37,16	38,27	39,42	Dit.PAUD
IKK 1.5	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	2,75	3,25	3,5	3,7	4,00	18,27	18,82	19,38	19,96	Dit.PAUD
IKK 1.6	Persentase PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		5,0	10,0	15,0	20,0	194,97	200,82	206,84	213,05	Dit.PAUD
IKK 1.7	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	-	40	55	65	80	87,08	89,69	92,38	95,15	Dit.PAUD
IKK 1.8	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	19,0	35	47	60	75	19,21	19,78	20,38	20,99	Dit.PAUD
IKK 1.9	Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	70,0	90,00	97,20	97,90	98,90	40,31	41,52	42,77	44,05	Dit.PAUD
2003	Pembinaan Sekolah Dasar							1.280,46	1.318,88	1.358,44	1.399,20	
SK 2	Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Dasar yang merata dan berkualitas							1.280,46	1.318,88	1.358,44	1.399,20	
IKK 2.1	Jumlah Kab/Kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	381,0	401	411	421	431	29,33	30,21	31,12	32,05	Dit.SD
IKK 2.2	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-	1.172	2.344	3.516	3.839	31,00	31,93	32,88	33,87	Dit.SD
IKK 2.3	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%	-	5,0	10,0	15,0	20,0	122,52	126,19	129,98	133,88	Dit.SD
IKK 2.4	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50,0	55	58	60	63	35,67	36,74	37,84	38,97	Dit.SD
IKK 2.5	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi	%	-	27,40	28,30	29,20	30,10	35,67	36,74	37,84	38,97	Dit.SD

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	kompetensi minimum											
IKK 2.6	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	36,0	65,00	67,50	70,00	72,50	869,64	895,72	922,60	950,27	Dit.SD
IKK 2.7	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	35	40	45	50	75,22	77,48	79,80	82,19	Dit.SD
IKK 2.8	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,0	95,20	95,30	95,40	95,50	81,43	83,87	86,39	88,98	Dit.SD
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama							1.071,65	1.103,80	1.136,91	1.171,02	
SK 3	Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang merata dan berkualitas							1.071,65	1.103,80	1.136,91	1.171,02	
IKK 3.1	Jumlah Kab/Kota dengan APK SMP/MTs/SMP/PLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	307,0	327	337	347	357	55,10	56,75	58,45	60,21	Dit.SMP
IKK 3.2	Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		1.603	1.683	1.767	1.856	29,57	30,46	31,37	32,31	Dit.SMP
IKK 3.3	Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		5,0	10,0	15,0	20,0	113,40	116,80	120,31	123,92	Dit.SMP
IKK 3.4	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50,0	55,0	58,0	60,0	63,0	33,10	34,10	35,12	36,17	Dit.SMP
IKK 3.5	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%		27,4	28,3	29,2	30,1	33,10	34,10	35,12	36,17	Dit.SMP
IKK 3.6	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	52,0	65,00	67,50	70,00	72,50	665,99	685,97	706,54	727,74	Dit.SMP
IKK 3.7	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	35	40	45	50	66,52	68,51	70,57	72,68	Dit.SMP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
IKK 3.8	Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	94,5	95,90	96,60	97,30	98,00	74,87	77,12	79,43	81,81	Dit.SMP
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas							438,24	456,75	470,45	484,56	
SK 4	Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merata dan berkualitas							438,24	456,75	470,45	484,56	
IKK 4.1	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	kab/kota	209,0	229	239	249	259	14,49	14,92	15,37	15,83	Dit.SMA
IKK 4.2	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		650	1.300	1.950	2.600	42,54	43,81	45,13	46,48	Dit.SMA
IKK 4.3	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		5,0	10,0	15,0	20,0	149,15	153,63	158,24	162,98	Dit.SMA
IKK 4.4	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50,0	55,0	58,0	60,0	63,0	35,51	36,58	37,67	38,80	Dit.SMA
IKK 4.5	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%		27,4	28,3	29,2	30,1	34,51	35,55	36,61	37,71	Dit.SMA
IKK 4.6	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	71,7	76,06	78,34	80,69	83,11	-	5,36	5,52	5,69	Dit.SMA
IKK 4.7	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	35	40	45	50	95,16	98,02	100,96	103,99	Dit.SMA
IKK 4.8	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,0	95,20	95,30	95,40	95,50	66,88	68,88	70,95	73,08	Dit.SMA
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus							687,73	708,36	729,61	751,50	
SK 5	Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas							687,73	708,36	729,61	751,50	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
IKK 5.1	Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak	Lembaga		452	511	570	629	30,30	31,21	32,15	33,11	Dit.PMPK
IKK 5.2	Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		5,0	10,0	15,0	20,0	414,21	426,64	439,43	452,62	Dit.PMPK
IKK 5.3	Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	5,2	14,08	18,50	22,93	26,69	17,84	18,38	18,93	19,50	Dit.PMPK
IKK 5.4	Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%		35	40	45	50	32,40	33,37	34,37	35,40	Dit.PMPK
IKK 5.5	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	pemda		514	514	514	514	49,27	50,75	52,27	53,84	Dit.PMPK
IKK 5.6	Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	orang		94.500	94.500	94.500	94.500	77,52	79,84	82,24	84,71	Dit.PMPK
IKK 5.7	Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	98,67	99,19	99,44	99,70	99,96	66,19	68,17	70,22	72,33	Dit.PMPK
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah							249,27	256,74	264,45	272,38	
SK 6	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen							249,27	256,74	264,45	272,38	
IKK 6.1	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%		99	99	99	99	7,70	7,93	8,17	8,41	Setditjen
IKK 6.2	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan neraca pendidikan/matriks daerah sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran/ kebijakan pendidikan	prov/kab/kota		330	370	400	450	7,45	7,67	7,90	8,14	Setditjen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
IKK 6.3	Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	14,63	15,07	15,52	15,98	Setditjen
IKK 6.4	Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat Zi-WBK/WBBM	satker	69	14	17	20	23	5,98	6,16	6,34	6,53	Setditjen
IKK 6.5	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	nilai	80	82	83	84	85	20,21	20,81	21,44	22,08	Setditjen
IKK 6.6	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,00	95,40	95,60	95,80	96,00	193,31	199,11	205,08	211,23	Setditjen
4273	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD							444,56	457,89	471,63	485,78	
SK 7	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat							444,56	457,89	471,63	485,78	
IKK 7.1	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya	%		50	60	77	90	41,86	43,12	44,41	45,74	BPPAUD
IKK 7.2	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya	%		50	60	77	90	41,86	43,12	44,41	45,74	BPPAUD
IKK 7.3	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP	%		40	45	50	55	25,42	26,19	26,97	27,78	BPPAUD
IKK 7.4	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbaru dan berkelanjutan	%		90	92	94	96	335,41	345,48	355,84	366,52	BPPAUD
5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan							866,92	892,93	919,72	947,31	
SK 8	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan							866,92	892,93	919,72	947,31	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
IKK 8.1	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	%		27,4	28,3	29,2	30,1	117,17	120,69	124,31	128,04	LPMP
IKK 8.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%		5	5	5	5	22,14	22,80	23,49	24,19	LPMP
IKK 8.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%		95,2	95,4	95,6	95,8	727,61	749,44	771,92	795,08	LPMP